



2025 LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

**Direktorat Pemberdayaan Usaha
Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha ke depan.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Direktur Pemberdayaan Usaha



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2025 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan II Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Dari 11 indikator kinerja tersebut sebanyak 4 (empat) telah dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2025, sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena tidak ada target capaian pada triwulan III. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ke-4 indikator kinerja telah mencapai target Triwulan III tahun 2025. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan III Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 105,70%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dari 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 6 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 4 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 6 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase UMKM pengolahan produk KP yang meningkat omset, (2) Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan, (3) Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (4) Nilai minimal yang dipersyaratkan

untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (5) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (6) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (2) Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan, (3) Nilai Pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program, (4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja triwulan III atas 4 indikator yang bersifat triwulanan adalah (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp7,44 Triliun atau dengan kata lain tercapai 101,5% dari target Triwulan III (2) Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan, telah teralisasi 40 izin usaha atau dengan kata lain tercapai 100% dari target triwulan III; (3) Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya telah terealisasi sebesar 1,80% atau tercapai 120% dari target triwulan III; (4) Nilai Pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program teralisasi sebesar Rp5,62 Triliun atau dengan kata lain tercapai 102,18% dari target triwulan III; dan (5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 100% atau dengan kata lain tercapai 105,26% dari target triwulan III.

Pada Triwulan III Tahun 2025, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar Rp12.619.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp10.796.753.000,-, sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp1.822.747.000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.058.289.250,- atau setara dengan 58,06% terhadap total pagu anggaran awal atau 18,75% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dicapai selama triwulan III Tahun 2025, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan

untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5. Permasalahan Utama	6
1.6. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	22
3.2.1. Sasaran Strategis 1	24
Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	24
IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan.	24
IK2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan	32
3.2.2. Sasaran Strategis 2	35
Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan.....	35
IK3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkat Omsetnya.....	35

IK4.	Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan	38
IK5.	Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Melalui Kredit Program	52
3.2.3	Sasaran Strategis 3	66
	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	66
IK6.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha ...	66
IK7.	Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	68
IK8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha	68
IK9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	69
IK10.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	70
IK11.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	71
BAB IV.	PENUTUP	73
4.1.	Kesimpulan	73
4.2.	Rekomendasi	74
4.3.	Tindak Lanjut	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025.....	20
Tabel 2 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025...	23
Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai investasi kelautan dan perikanan pada Triwulan III Tahun 2025.....	25
Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan Triwulan III Tahun 2025.....	33
Tabel 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan III Tahun 2025.....	36
Tabel 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan III 2025.....	39
Tabel 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program Triwulan III 2025.....	53
Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025.....	67
Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025.....	68
Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025.....	70
Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025..	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang).....	4
Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan.....	5
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan.....	6
Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III.....	22
Gambar 3. 2 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sumber Permodalan Triwulan III 2024 – 2025.....	25
Gambar 3. 3 Rapat Koordinasi Persiapan <i>Investment and Business Matching</i>	28
Gambar 3. 4 Pendampingan Rencana Investasi PT. Indochina Maritime.....	29
Gambar 3. 5 Pendampingan Investasi Pelaku Usaha Korea Selatan dan Mexico.....	30
Gambar 3. 6 Pendampingan Investasi PT. Hatindo Makmur.....	31
Gambar 3. 7 Pendampingan Investasi PT. Agriwestindo Abadi.....	32
Gambar 3. 8 Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan.....	34
Gambar 3. 9 Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan.....	35
Gambar 3. 10 Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Kelautan dan Perikanan.....	38
Gambar 3. 11 Launching Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada tanggal 21 Juli 2025.....	41
Gambar 3. 12 Sosialisasi Pembuatan Proposal Bisnis dan Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Satgas Nasional dan Daerah serta HIMBARA pada tanggal 11 September 2025.....	43
Gambar 3. 13 Rapat Koordinasi Penyusunan Database Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 September 2025.....	44
Gambar 3. 14 Musyawarah Desa Khusus dengan mengundang 239 Kodeskel Merah Putih pada tanggal 24 September 2025.....	46
Gambar 3. 15 Pembahasan Rencana Pendampingan Bisnis untuk KDKMP Terpilih pada tanggal 29 September 2025.....	48
Gambar 3. 16 Pembahasan Model Bisnis Sentra Pengolahan Ikan Asin Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada tanggal 22 September 2025..	49

Gambar 3. 17 Gambar Realisasi Kredit Program Berdasarkan Sektor Usaha Perikanan.....	54
Gambar 3. 18 Fasilitas Pembiayaan dan Literasi Keuangan di Kota Surakarta tanggal 22 Juli 2025.....	56
Gambar 3. 19 Rapat Sosialisasi dan Fasilitas Pembiayaan SRG.....	57
Gambar 3. 20 Rapat Koordinasi Pokja Kredit Program.....	63
Gambar 3. 21 Fasilitas Akses Pembiayaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel.....	66
Gambar 3. 22 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 30 Juni 2025.....	67

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 176 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Prasarana dan Sarana
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- d. Direktorat Pengolahan;
- e. Direktorat Pemasaran; dan
- f. Direktorat Akses dan Promosi.

Selanjutnya dalam Pasal 187 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan,

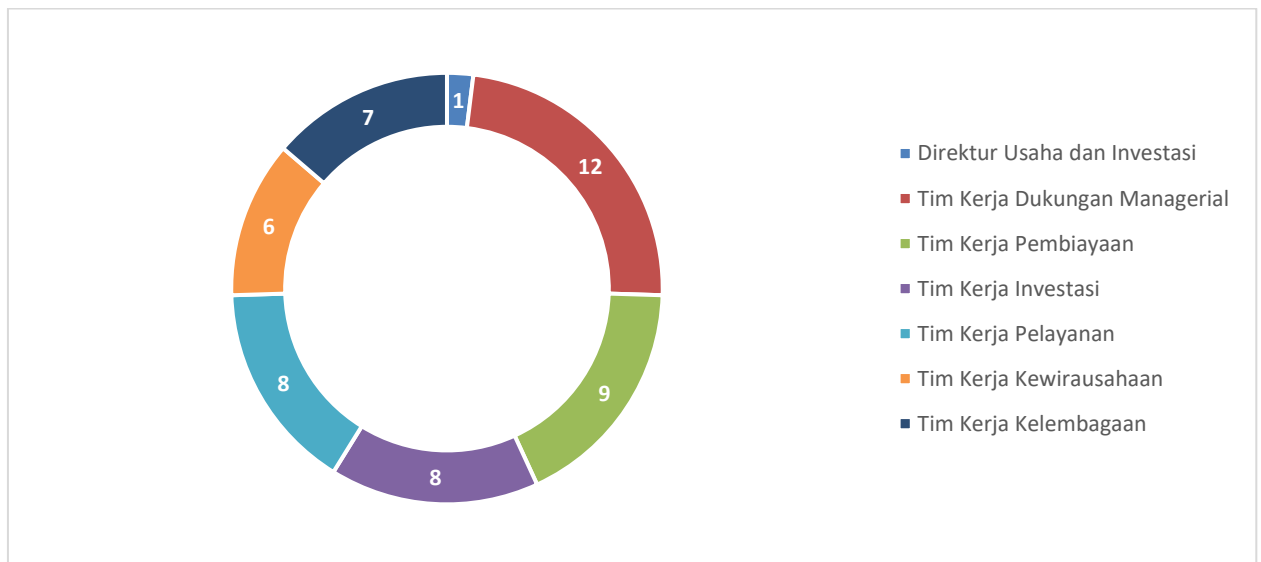
pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan; dan

f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

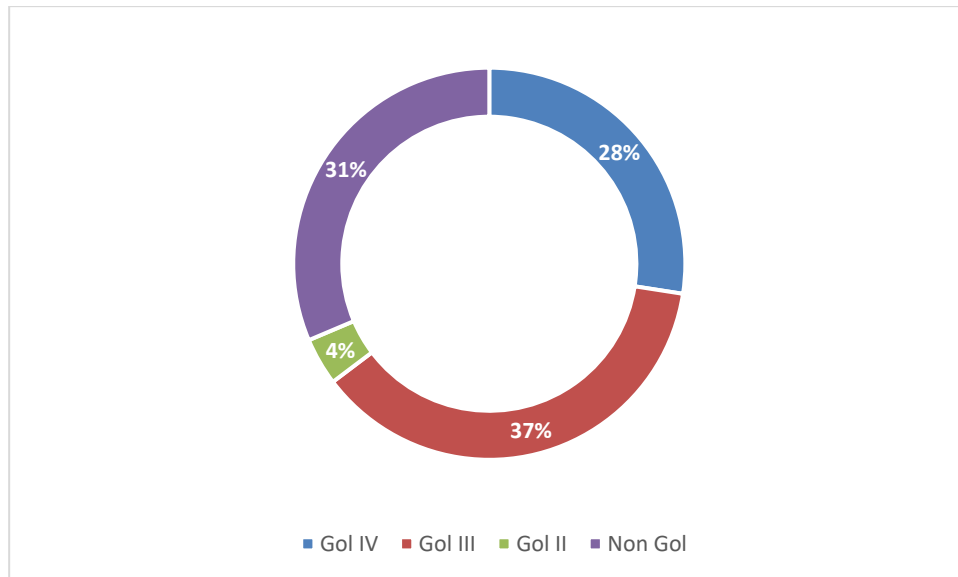
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berjumlah 51 orang, yang terdiri atas 35 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 5 orang Pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang tersebar di 6 Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Investasi sebanyak 8 orang; Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Pembiayaan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Kewirausahaan 7; Tim Kerja Kelembagaan sebanyak 8 orang; dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebanyak 12 orang.



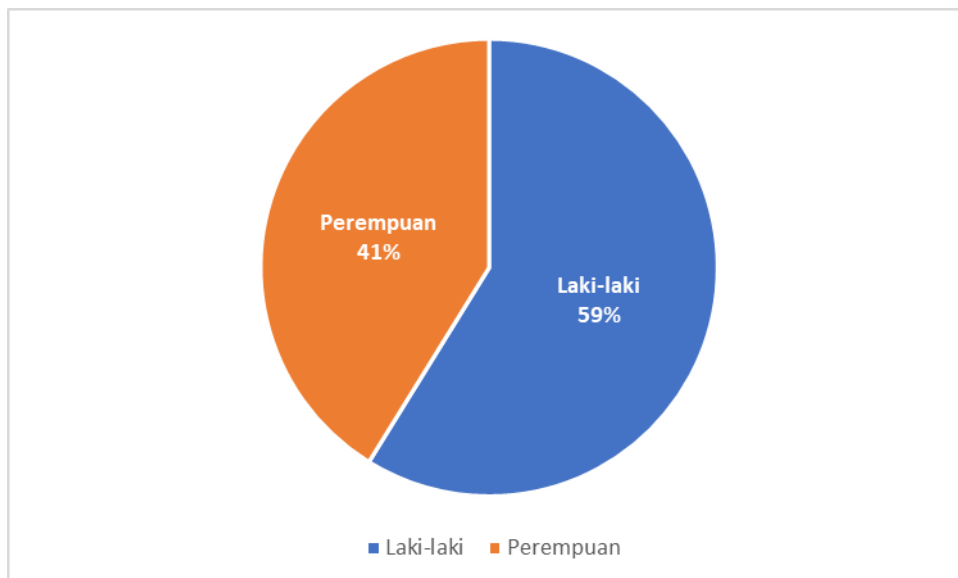
Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 2 orang dan Non Golongan sebanyak 16 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak pada golongan III, yakni 37%.



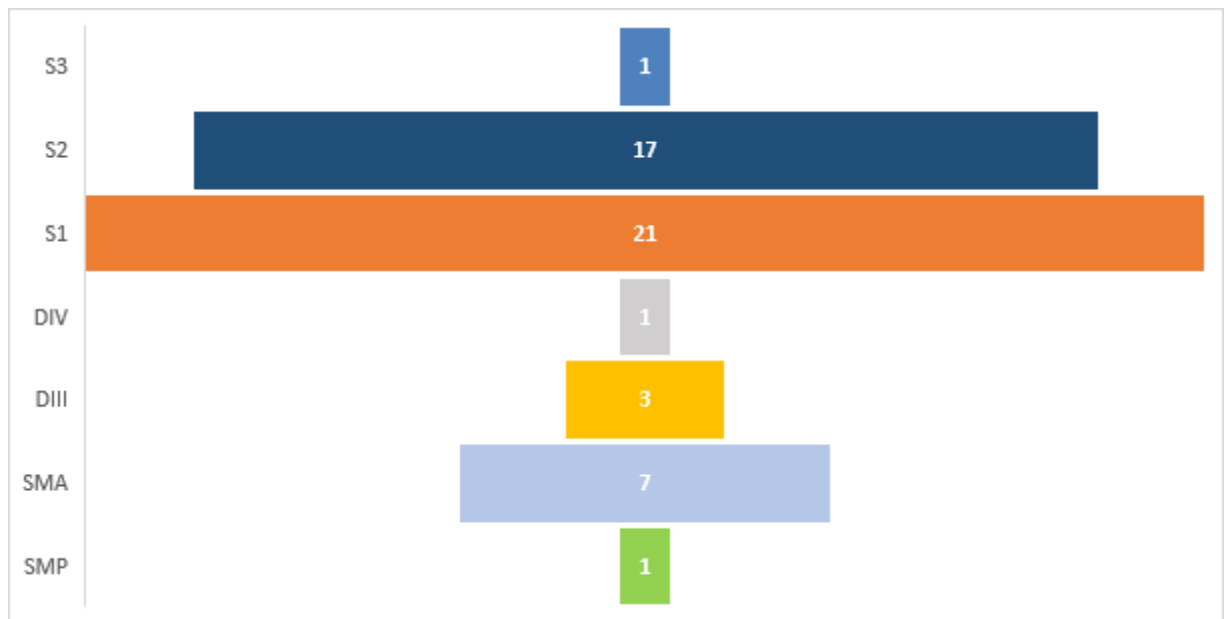
Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 30 orang, atau 59% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 41% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 21 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 7 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengolahan, akses modal terbatas, rantai pasok belum efisien, kualitas SDM dan teknologi yang kurang memadai, rendahnya nilai tambah produk, akses pasar terbatas dan lemahnya branding, dan kebijakan dan kordinasi yang belum sinkron.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian.

Dampak kondisi perekonomian nasional saat ini terhadap perkembangan sektor usaha kelautan dan perikanan sangat signifikan karena sektor ini sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal, perdagangan, dan daya beli masyarakat, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah

dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2025, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan I 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat

Pemberdayaan Usaha serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Renstra Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029. Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif terkait pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan pada lima tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu

“Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) **transformasi ekonomi**, dan (b) **ketahanan sosial budaya dan ekologi**. Dukungan tersebut akan dikuatkan dengan strategi sebagai berikut : (a) Hilirisasi Penangkapan Ikan berbasis komoditas unggulan, (b) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, (c) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk

pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional, (d) Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, (e) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan, (f) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat dan (g) Penguatan pasar luar negeri.

2.1.2 Misi

Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden (Bab 1) serta Misi KKP yang mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 8**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
2. **“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan **Misi Asta Cita 6**, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
3. **“Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 3**, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan **Misi Asta Cita 5**, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

4. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan
5. **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 7**, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

- (a) Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
- (b) Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
- (c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut, yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah **“meningkatkan mutu dan daya saing hasil produk kelautan dan perikanan”**. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2.1.4 Sasaran

Sasaran strategis (SS) pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai *outcome/impact* dari program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025-2029. Sebagai organisasi di bawah KKP, sasaran strategis Ditjen PDSPKP melekat pada sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Dari lima sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung secara langsung dua sasaran strategis, yaitu: **SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**, dan **SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas**.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pada Bagian A dan kebijakan KKP pada Bagian B, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029 yang disampaikan pada Bab 2. Terkait agenda penguatan

transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pada agenda **transformasi ekonomi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 4: Iptek inovasi dan produktivitas ekonomi, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Pengembangan UMKM kelautan dan perikanan tembus pasar global
 - Kemudahan akses pembiayaan
- ❖ IE 7: Integritas ekonomi domestik global, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Peningkatan investasi asing serta integrasi produk KP pada skema GPN
 - Penguatan sistem logistik ikan nasional
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung hilirisasi
 - Transformasi digital pemasaran produk dan jasa ekosistem kelautan dan perikanan

Selanjutnya pada agenda **ketahanan sosial budaya dan ekologi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
 - Penyediaan sistem rantai dingin yang merata
 - Pengembangan pangan akuatik (*blue foods*)
 - Penanganan *stunting* melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Dengan memperhatikan semua arahan tersebut, maka target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang kemudian menjadi arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025-2029, dinyatakan:

“Kebijakan PDSPKP : Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor”

Kebijakan dan strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung

pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 tersebut adalah:

a. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.**

- ❖ Kegiatan PDSDKP-1: Prasarana dan Sarana hasil kelautan dan perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-2: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-3: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-4: Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-5: Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan

b. **Program Dukungan Manajemen.** Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2025-2029, yaitu:

- ❖ Kegiatan PDSDKP-6: Dukungan Manajemen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah:

1. **Pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi**

Mengidentifikasi dan menganalisa potensi dan peluang **usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** sehingga potensi dan peluang tersebut dapat dipetakan dan siap ditawarkan kepada para calon pelaku usaha atau investor.

Langkah operasional yang perlu diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1) Identifikasi potensi pemberdayaan usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan pada suatu kawasan atau wilayah
- 2) Analisa potensi usaha dan investasi menjadi satu peluang usaha dan investasi komoditas unggulan pada suatu kawasan atau wilayah yang siap ditawarkan kepada calon pelaku usaha atau investor
- 3) Pemetaan peluang usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan

2. Fasilitas Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan

1) Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- Identifikasi tingkat literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Analisa intervensi yang dibutuhkan untuk masing-masing tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Penyusunan bahan dan materi sosialisasi dan edukasi sesuai dengan tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Sosialisasi dan edukasi bahan dan materi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan bimbingan teknis literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pendampingan literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan

2) Akses Pembiayaan

Kegiatan fasilitas pembiayaan dan kemitraan usaha bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan pelaku usaha dapat mengakses sumber pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan, serta menjalin kemitraan yang menguntungkan untuk memperluas skala bisnis mereka. Dengan kemudahan akses pembiayaan dan kemitraan, diharapkan usaha kecil dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, langkah-langkah untuk peningkatan akses melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro, dan dana bergulir adalah:

- Identifikasi calon debitur potensial berbasis kelas UMKM dan/atau data KUSUKA
- Fasilitasi akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan
- Pembinaan klaster pembiayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Pembentukan Pokja Kredit Program melibatkan lembaga penyalur kredit program
- Sinergi mendukung program prioritas KKP dalam hal fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan juknis penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan laporan kebutuhan pembiayaan usaha
- Evaluasi kebutuhan pembiayaan oleh Tim Pokja Kredit Program
- Penetapan kelayakan pembiayaan dan jenis kredit yang diberikan
- Pendampingan akses pembiayaan oleh tenaga pendamping atau penyuluh perikanan
- Fasilitasi penyaluran kredit melalui lembaga penyalur kredit program Pemerintah
- Analisis dampak pelaku usaha penerima kredit program

3. Fasilitasi Pendampingan Kewirausahaan dan Pembentukan Wirausaha Baru Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Kegiatan ditujukan untuk: (a) menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, (b) menciptakan wirausaha baru produk KP yang inovatif dan kreatif, (c) meningkatkan kapasitas wirausaha yang akan naik kelas, (d) membentuk wirausaha berkarakter kuat dan handal, dan (e) Penguatan kapasitas usaha menuju wirausaha mapan dan calon wirausaha ekspor.

Sasaran **penumbuhan usaha** baru adalah siswa/purna siswa sekolah menengah atas/kejuruan, mahasiswa/alumni perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sedangkan **sasaran pendampingan** wirausaha adalah pelaku usaha/wirausaha yang membutuhkan pendampingan usaha. **Langkah-langkah** yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan wirausaha kelautan dan perikanan adalah:

1. Sosialisasi kewirausahaan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang wirausaha dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam berwirausaha.

2. Analisis kebutuhan untuk menggali informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh calon wirausaha dalam membangun sebuah usaha
3. Seleksi calon wirausaha yang benar-benar berminat dan tidak beralih ke pekerjaan lain
4. Pelatihan peningkatan kapasitas calon wirausaha/wirausaha yang akan naik kelas.

4. Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Kemitraan Usaha

1. Kelembagaan Usaha

Fasilitas pengembangan kelembagaan menjadi titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Langkah operasional yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha meliputi :

- 1) Penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum
- 2) Fasilitas pembentukan lembaga usaha berbadan hukum
- 3) Identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya
- 4) Perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan
- 5) Penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis
- 6) Pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi
- 7) Pembentukan dan pembinaan lembaga inkubator bisnis
- 8) Pengembangan usaha di dalam dan luar kawasan usaha

9) Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha

2. Kemitraan

Fasilitasi ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

Langkah operasional pelaksanaan fasilitasi kemitraan meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan kemitraan
2. Fasilitasi dan pendampingan usaha perikanan sektor hulu (tangkap dan budidaya) untuk bermitra dengan usaha hilir (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
3. Fasilitasi kerjasama usaha mikro kecil dan koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Fasilitasi kerjasama UMKM hasil kelautan dan perikanan dengan BUMN dalam rangka mengakses Program Kemitraan BUMN
5. Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk bermitra dengan distributor dan jaringan pemasaran digital.

5. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan Serta Pendampingan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sistem perizinan berusaha saat ini dilaksanakan berbasis risiko, *post audit* dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS). Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha mendapatkan mandat melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen untuk setiap pelaku usaha dengan status PMA.

Tujuan utama fasilitasi pelayanan perizinan berusaha adalah memberikan keterbukaan akses informasi kepada pelaku usaha perihal persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu perizinan serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dengan harapan pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang terbaik dan merasakan manfaat atas pelayanan perijinan yang diberikan. Alur perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran ikan adalah:

1. Mendaftar melalui situs <http://oss.go.id> untuk mendapatkan akses dengan membuat akun nama pengguna dan kata sandi
2. Memasukkan bidang usaha, nilai investasi serta kelengkapan data pendukung maka sistem akan menerbitkan NIB
3. Sistem OSS RBA akan memverifikasi pengajuan pada tahapan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak
4. Jika mengambil KBLI dengan tingkat risiko menengah rendah izin usahanya terbit otomatis, sedangkan KBLI dengan tingkat berisiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar
5. Sertifikat standar yang telah terverifikasi merupakan izin usaha dan bisa digunakan untuk mengurus PB untuk menunjang kegiatan usaha (UMKU) untuk operasional dan komersial
6. Kewajiban pelaku usaha setelah perizinan berusaha terbit:
 - Memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala usaha mikro dan kecil paling lama 2 (dua) tahun dan Skala usaha menengah dan besar paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan
 - Membuat laporan kegiatan usaha pengolahan ikan setiap 6 (enam) bulan kepada Penerbit Sertifikat Standar.

Pendampingan investasi dilakukan untuk menindaklanjuti rencana investasi dalam dokumen usulan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen. Selain itu, pendampingan investasi juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil promosi peluang investasi kelautan dan perikanan yang berupa minat investasi pada sektor kelautan dan perikanan, baik dari PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan untuk melakukan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen, serta pendampingan investasi adalah:

1. Penyiapan bahan kebijakan pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik dalam rangka penguatan budaya layanan prima
3. Pendampingan perijinan berusaha, verifikasi dokumen rencana kegiatan usaha dan penerbitan perizinan berusaha
4. Sosialisasi kebijakan perizinan berusaha
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan pengolahan ikan, pemasaran ikan, dan jasa pasca panen penangkapan ikan
6. Pendampingan pelaporan kegiatan usaha
7. Verifikasi calon investor yang minat investasi dan/atau memiliki rencana investasi di sektor kelautan dan perikanan
8. Pendampingan calon investor dalam rangka penyelesaian hambatan investasi, fasilitasi perolehan insentif fiskal dan non-fiskal, serta percepatan realisasi investasi
9. Analisis dan pemantauan capaian realisasi usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
10. Sosialisasi dan edukasi tata cara melakukan usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan di Indonesia.
11. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

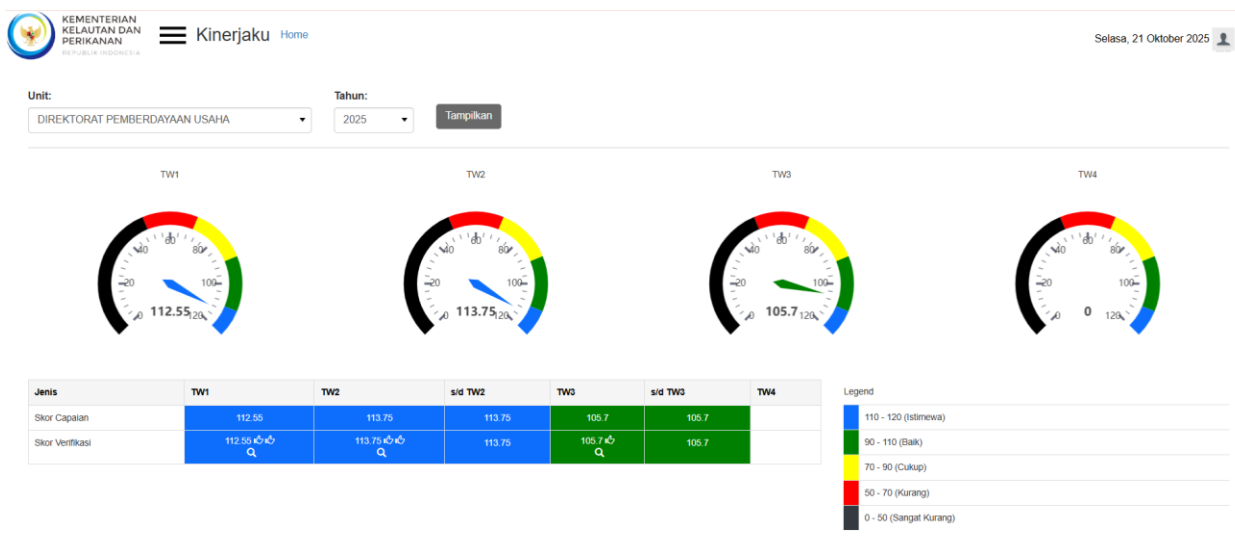
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	1.	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	13,11
		2.	Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	50

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	3.	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5
		4.	Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	6
		5.	Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	7,99
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		10.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81
		11.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025 sebesar 105,7% dengan predikat Baik.

Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III Tahun 2025, terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi		
		2025	TW III	Sd TW III	% thd Target TW III	% sd thd Target 2025
1	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	13,11	7,33	7,44	101,50	56,75
2	Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	50	40	40	100	80
3	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5	1,5	1,8	120	36
4	Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	6	-	-	-	-
5	Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	7,99	5,50	5,62	102,18	70,34
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95	95	100	105,26	105,26
7	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100	-	-	-	-
8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75	-	-	-	-
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86	-	-	-	-
10	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	87	87,67	100,77	100,77
11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1	-	-	-	-

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan

IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan.

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan.

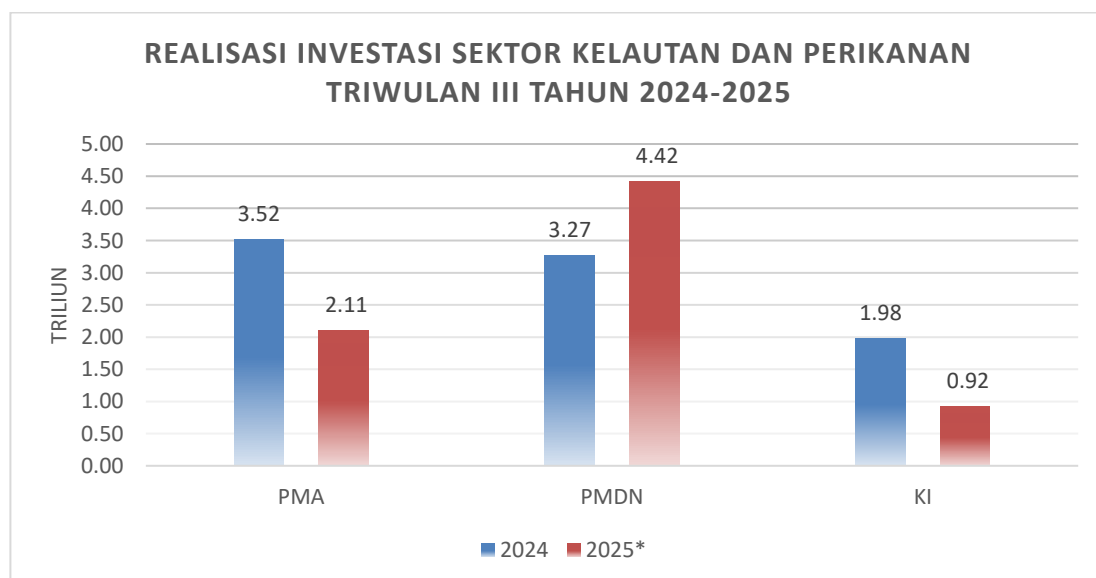
Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Prsent aseRea lisasi s.d TW III terhad ap target 2025
	TW III 202 5	TW IV 202 4	TW III 202 4	Tah un 202 5	TW III 202 5	TW IV 202 4	TW III 202 4	s.d TW II 202 5	TW III 202 5	TW IV 202 4	TW III 202 4	
Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	7,33	9	6,69	13,11	7,45*	12,35	8,77	7,45*	101,58	82,77	111,36	56,82

Ket : * Angka Prognosa

Realisasi investasi KP pada triwulan III tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp7,45 triliun, yakni tercapai 101,58% jika dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar Rp7,33 triliun, atau mencapai 56,82% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni Rp13,11 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2024 sebesar Rp8,77 triliun maka capaian ini mengalami perlambatan sebesar -15,12%.



Ket: *) angka prognosa

Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diolah Ditjen PDS

Gambar 3.2. Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sumber Permodalan Triwulan III 2024 - 2025

Perkiraan realisasi investasi pada triwulan III tahun 2025 terdiri dari PMA sebesar Rp2,11 triliun, PMDN sebesar Rp4,42 triliun dan kredit investasi sebesar Rp0,92 triliun. Realisasi PMA diperkirakan mengalami perlambatan 40,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,52 triliun. Adapun realisasi PMDN diperkirakan meningkat 35,18% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,27 triliun, dan kredit investasi diperkirakan melambat 53,63% dari periode yang sama tahun sebelumnya triwulan III tahun 2024 sebesar Rp1,98 triliun.

Direktorat Pemberdayaan Usaha telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.000.000.000,-. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp4.490.695.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp509.305.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp229.841.467,- atau setara dengan 4,60% terhadap total pagu anggaran awal atau 45,13% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

Kegiatan dalam rangka peningkatan investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan.

Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan merupakan kawasan pemusatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi secara sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dalam rangka

hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Pada triwulan III tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha melanjutkan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan. Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama Sesditjen PDSPKP telah mengadakan rapat trilateral antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada tanggal 23 September 2025. Pokok-pokok hasil pembahasan yaitu :

- a) Kementerian Perindustrian serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada prinsipnya menyetujui penambahan kewenangan KKP berupa rekomendasi kelayakan rencana pengembangan dan pengelolaan usaha Kawasan Hilirisasi Hasil KP;

- b) Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan tahapan rekomendasi diberikan setelah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c) Pembangunan kawasan hilirisasi hasil KP sepanjang dibangun di Kawasan Peruntukan Industri dan memiliki luas lahan kurang dari 50 Ha dapat dikategorikan dalam kawasan industri tertentu;
- d) Kementerian Perindustrian akan mempertimbangkan usulan KKP terkait penambahan kewenangan untuk kawasan industri tertentu (sektor kelautan dan perikanan) pada Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kawasan Industri Tertentu;
- e) KKP juga mengusulkan untuk dapat terlibat dalam perumusan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian terkait Kawasan Industri Tertentu; dan menyampaikan beberapa poin yang perlu disempurnakan pada rancangan Peraturan Menteri Perindustrian terkait kawasan Industri tertentu diantaranya:
 - Rekomendasi kelayakan usaha pengembangan industri tematik tertentu dari Kementerian/Lembaga teknis terkait yang menjadi bagian penilaian terhadap permohonan pembangunan kawasan industri tematik; dan
 - Penambahan Pelabuhan Perikanan sebagai salah satu lokasi yang dapat ditetapkan dalam Pembangunan Kawasan Industri Tertentu yang memenuhi kondisi kebijakan Industri nasional untuk mendukung percepatan pembangunan dan penyebaran Industri.

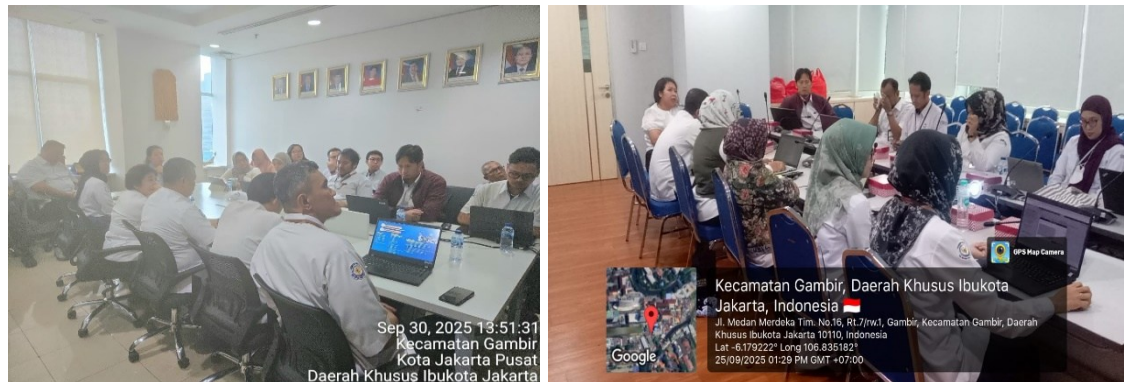
2. Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan pada suatu wilayah dalam rangka meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan III antara lain :

a. Penyusunan bahan Promosi Potensi dan Peluang Investasi

Kegiatan promosi potensi dan peluang investasi direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2025, dalam rangka penyiapan bahan kegiatan tersebut Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan *Investment and Business Matching* pada 25 September 2025 dan 30 September 2025 dengan melibatkan eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan eselon I lingkup KKP. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka

penyampaian konsep kegiatan *Investment and Business Matching* dan menjaring masukan serta data calon investor dan/atau calon buyer potensial.



Gambar 3. 3 Rapat koordinasi persiapan *Investment and Business Matching*

b. Pendampingan Rencana Investasi

1) Pendampingan Rencana Investasi PT. Indochina Maritime international

PT IMI adalah perusahaan PMA yang berkedudukan di Jakarta Barat yang memiliki 1 (satu) perizinan berusaha yang telah terbit, yakni usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan lainnya, serta 9 (sembilan) izin usaha yang belum terbit untuk bidang usaha perdagangan besar hasil olahan perikanan, penangkapan ikan, budidaya/pembesaran ikan, dan industri pengolahan ikan. Rapat pendampingan rencana investasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 di Ruang Rapat Pontianak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri dan Eselon II lingkup BKPM, dan Direktur PT Indochina Maritime International (IMI) dan perwakilan KKP antara lain Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta perwakilan DJPT, DJPB dan DJPDS.

PT IMI berkomitmen melakukan investasi senilai USD 200 juta (setara Rp3,24 Triliun) untuk pembangunan industri maritim terpadu, dengan perkiraan kebutuhan lahan di darat mencapai 5.000 Ha dan area perairan laut seluas 10.000 Ha. Investasi tersebut meliputi usaha penangkapan ikan, budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran), pengolahan hasil perikanan, cold chain logistic, Equiped Smart Fishery, Pusat Pendidikan dan Biologi Kelautan, pelestarian bibit dan kultivasi, *fish engineering*; Pusat Inkubasi

Smart Ocean Technology, serta pusat perkapalan, kerja sama antara perguruan tinggi Indonesia dan Tiongkok.

Rencana investasi tersebut ditargetkan mampu memproduksi 400.000 ton/tahun hasil perikanan tangkap dan 21.000 ton/tahun hasil perikanan budidaya. Komoditas utama yang akan diproduksi yaitu tuna, dan akan dikembangkan lebih lanjut untuk ikan demersal ekonomis penting, seperti kerapu, kakap, dan lobster. Lapangan kerja yang diperkirakan dapat diciptakan dari rencana investasi ini yaitu 5.000 orang, 2.000 orang diantaranya akan direkrut dari SDM lokal.



Gambar 3. 4 Pendampingan Rencana Investasi PT Indochina Maritime International

- 2) Pendampingan Rencana Investasi Pelaku Usaha Korea Selatan dan Mexico
Kegiatan audiensi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Investasi dengan dihadiri Hon. Jose Alfredo Ramirez, Second Vice President, Special Diplomatic Ambassador, International Affairs Council for Diplomatic Affairs of Sustainable Development Goals, Bapak Sutrisno – Pelaku Usaha Non Perikanan dan Bapak Sukanto dari Universitas Gadjah Mada. Tujuan audiensi adalah untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia yakni (a) Minat investasi penangkapan dan/atau pengolahan tuna untuk diekspor ke Korea Selatan dari calon mitra Bapak Sutrisno yang berasal dari Korea Selatan dan (b) Minat investasi untuk budidaya tuna dengan teknologi dari Mexico dengan calon investor dari Mexico. Dalam audiensi tersebut dibahas beberapa hal antara lain :
 - a. Terdapat calon investor dari Korea yang berencana untuk berinvestasi atau bermitra di bidang penangkapan dan/atau pengolahan tuna di Indonesia, khususnya jenis Big Eye Tuna dan Yellowfin Tuna kemudia

- Hasil produk akan dipasarkan ke Korea Selatan, dengan spesifikasi utuh beku yang dibekukan langsung diatas kapal (*whole frozen on board*) dan berukuran > 25 kg/ekor;
- Langkah awal yang akan dilakukan adalah identifikasi sumber daya tuna serta penentuan lokasi investasi yang potensial;
 - Mexico telah berhasil mengembangkan teknologi budidaya tuna sirip biru dan menawarkan kepada Pemerintah Indonesia untuk menerapkan teknologi budidaya tuna tersebut di Indonesia dan menawarkan investasi untuk kegiatan tersebut dari investor dari Mexico;
 - Bapak Alfredo meminta untuk dapat difasilitasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia yang aktif melakukan riset di bidang kelautan dan perikanan dan berkontribusi dalam mengembangkan perikanan di Indonesia lebih lanjut.



Gambar 3. 5 Pendampingan Investasi Pelaku Usaha Korea Selatan dan Mexico

3) Pendampingan Rencana Investasi PT Hatindo Makmur

PT. Hatindo Makmur merupakan pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) Taiwan dengan produk daging lumatan dan ikan beku yang berlokasi di Denpasar, Bali.

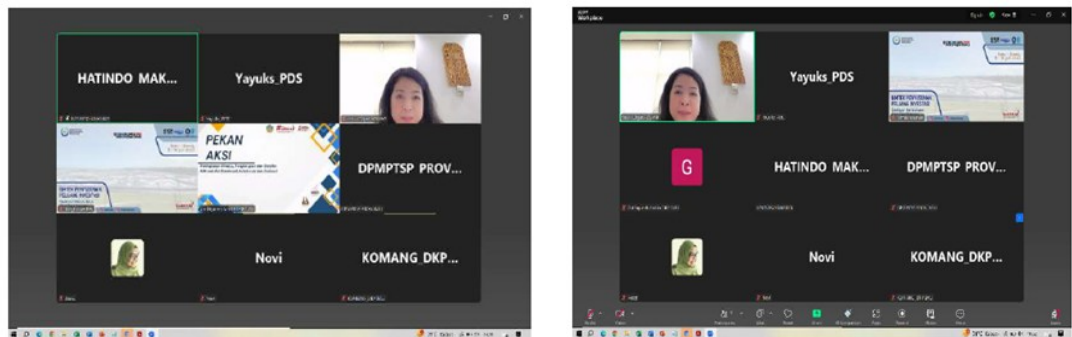
Pendampingan investasi dengan PT. Hatindo Makmur dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bali dan DPMPTSP Provinsi Bali pada tanggal 14 Juli 2025 secara online. Berdasarkan data Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun 2022, PT Hatindo Makmur berencana melakukan perluasan usaha pada KBLI 10297, 10216, 10219, 10299, 46206, dan 46324 dengan nilai

rencana investasi masing-masing sebesar Rp12.028.199.677. Sampai dengan tahun 2025 triwulan I, realisasi investasi yang disampaikan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah 0 (nol). Selain itu, PT Hatindo Makmur juga belum memiliki dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada KBLI tersebut.

Hasil koordinasi PT Hatindo Makmur secara periodik telah menyampaikan laporan lengkap pada LKPM untuk KBLI 10213, 10217 dan 10293. Adapun untuk KBLI 10297, 10216, 10219, 10299, 46206, dan 46324 sampai saat ini belum dilakukan realisasi investasi sehingga pelaporan pada LKPM disampaikan 0 (nol), dan terkait Penambahan izin usaha 6 (enam) KBLI baru tersebut dikarenakan adanya perubahan berupa penambahan ruang lingkup pada akta pendirian perusahaan per tahun 2022, yang kemudian dilanjutkan dengan pengurusan izin usaha untuk KBLI tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pemberdayaan Usaha akan melakukan pendampingan dan koordinasi lebih lanjut dengan DKP dan DPMPTSP Provinsi Bali untuk melakukan pendampingan kewajiban pengisian LKPM dan LKU terhadap KBLI perluasan kepada PT Hatindo Makmur.



Gambar 3. 6 Pendampingan Investasi PT Hatindo Makmur

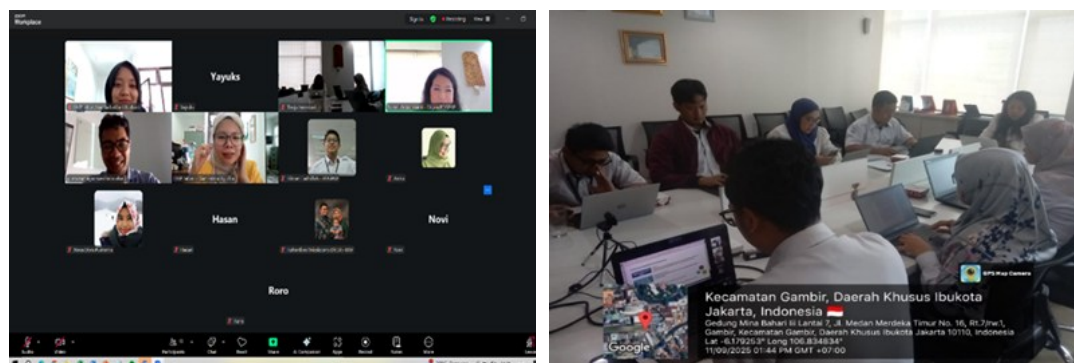
4) Pendampingan Rencana Investasi PT Agrowestindo Abadi

Pendampingan minat investasi kepada PT Agrowestindo Abadi yang berlokasi di Depok, Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 secara daring dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan DPMPTSP Jawa Barat. PT Agrowestindo Abadi menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan Ditjen PDS dan menyampaikan selama ini telah melakukan kegiatan usaha sejak tahun 2020 antara lain perdagangan besar (importir) untuk produk ikan, daging,

tumbuhan, kentang dan sayuran. Pada Tahun 2022 telah melakukan pelaporan penanaman modal sebesar Rp36 M dengan rincian modal tetap Rp36.491.899.963,- pada KBLI perdagangan besar daging, dan selanjutnya melaporkan Rp126.429,- (periode triwulan IV tahun 2024) dan periode triwulan 1 2025 sebesar Rp 144.115,- (modal tetap/sebagai nilai penyusutan).

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pasal 5 (setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM) dan pasal 32 (pelaku usaha menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha/lokasi). Pelaporan LKPM dipantau oleh BKPM dan diawasi oleh Ditjen PSDKP dalam proses pelaksanaan usaha.

Sebagai langkah tindak lanjut, PT Agrowestindo Abadi akan melaporkan realisasi penanaman modal pada periode selanjutnya terkait dengan kegiatan komersial.



Gambar 3. 7 Pendampingan Investasi PT Agrowestindo Abadi

IK2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program strategis, yang memudahkan para investor untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan antara lain: Layanan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya untuk

mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

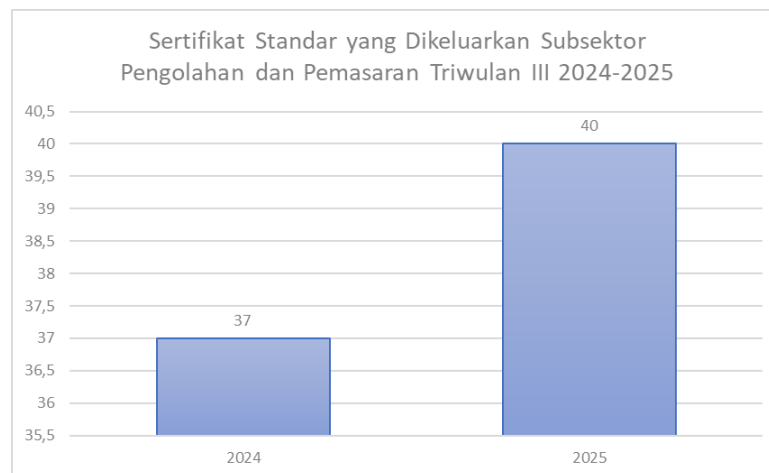
Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, sebagai indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan III, hal ini dikarenakan penilaian terhadap layanan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran bagi pelaku usaha KP baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Yang Diterbitkan Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2025
	TW III 2025	TW IV 2024	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW IV 2024	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW IV 2024	TW III 2024	
Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	40	-	-	50	40	-	-	40	100	-	-	80

Realisasi penerbitan sertifikat standar pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 6 Sertifikat Standar, yakni tercapai 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2025 sebesar 20 sertifikat, Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama

tahun sebelumnya yaitu Triwulan III tahun 2024 sebesar 37 sertifikat maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 92 %.



Gambar 3. 8 Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan

Kegiatan Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025, meliputi:

1. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode Triwulan III 2025, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali rapat verifikasi. Pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 Juli, 1, 12, dan 22 Agustus, 4, 18, dan 25 September 2025 di ruang rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta melalui *video conference*. Adapun Selama periode Triwulan III telah diterbitkan 23 Sertifikat Standar Pengolahan dan Pemasaran Ikan kepada 18 pelaku usaha (PT. Phillips Seafood Indonesia, PT. Bumi Laut Pertiwi, PT. Yanagi Histaralaya, PT. Nam Kyung Korea Indonesia, PT. Dunia Marine Product, PT. Shree Bhumi Samudera, PT. Origin Baru, PT. IMCD Indonesia, PT. Four Seasons Logistics Surabaya, PT. Shengfa International

Trading, PT. Agro Boga Utama, PT. Magellan Biotechnology Nusantara, PT. Indesso Niagatama, PT. BPH Global Indonesia, PT. Zhongyi Suplly Chain Service, PT. Pangan Lestari, PT. Panen Laut Lestari) yang bermohon dengan rincian 9 (sembilan) Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan Ikan dan 14 (empat belas) Sertifikat Standar Subsektor Pemasaran Ikan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 9 Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp46.135.001,- atau setara dengan 89,60% dari total pagu efektif sebesar Rp51.492.000,-.

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan

IK3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkatkan Omsetnya

Potensi UMKM kelautan dan perikanan masih sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Namun upaya pengembangan UMKM kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan salah satunya adalah aspek finansial dalam hal ini peningkatan omset. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kelautan dan perikanan diperlukan strategi pemberdayaan yang berpihak kepada UMKM dan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan omsetnya.

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya dalam rangka mendorong tumbuhnya UMKM untuk meningkatkan omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan. Pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 5% UMKM yang meningkatkan omsetnya dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\Sigma n \% = (\Sigma n1 / \Sigma n2) \times 100\%$$

$\Sigma n \%$ = Persentase peningkatan omset UMKM Pengolahan Produk KP

$\Sigma n1$ = Jumlah UMKM yang meningkatkan omsetnya

$\Sigma n2$ = Jumlah UMKM yang dibina

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkatkan omsetnya Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2025
	TW III 2025	TW IV 2025	TW II 2025	Tahun 2025	TW III 2025	TW IV 2025	TW III 2025	Sd. Tahun 2025	TW III 2025	TW IV 2025	TW III 2025	
Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkatkan omsetnya (Persen)	1,5	-	-	5	1,8	-	-	1,8	120	-	-	36%

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkatkan omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas sebesar 1,8% dari 647 UMKM terkurasi atau sejumlah 12 UMKM. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 5% maka realisasi presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas mencapai 36%.

Usaha mikro, kecil dan menengah bidang pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, operasional)

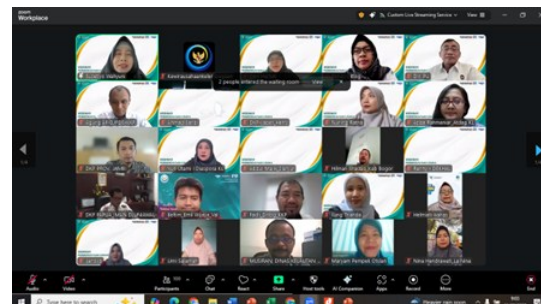
Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan pada triwulan III 2025, meliputi:

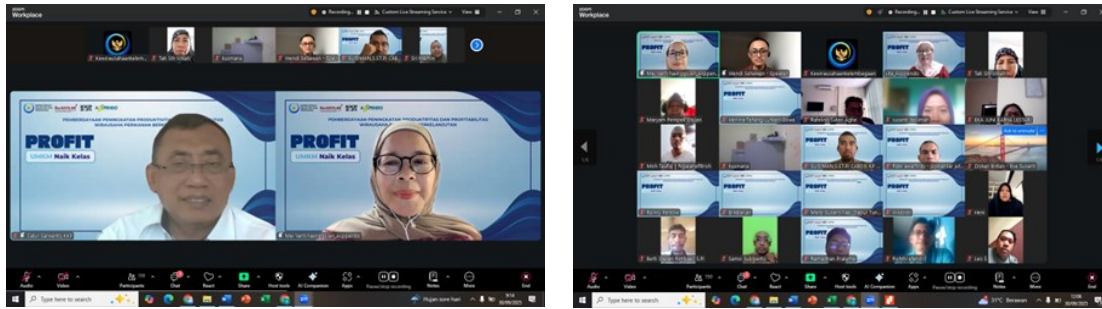
1. Webinar Pemberdayaan Usaha Series

Kegiatan webinar pemberdayaan usaha series bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan wirausaha KP dalam meningkatkan aspek usaha. Webinar Pemberdayaan Usaha Series dengan tema “Persyaratan, Preferensi Konsumen dan Kiat Menembus Pasar Malaysia Dalam Rangka UMKM Naik Kelas” pada tanggal 11 September 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur dan Ketua Indo_KL Women Perwakilan Diaspora Malaysia Sebagai narasumber, dengan peserta UMKM perikanan dan kelautan.

2. Webinar KKP kerjasama Asppendo

Kegiatan Webinar KKP kerjasama Asppendo dengan tema Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas dan Profitabilitas Wirausaha Berkelanjutan. Webinar tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Series pertama dengan tema Digital Marketing UMKM pada tanggal 16 September 2025 dan series kedua dengan tema Company Profile Micro Bussiness tanggal 30 September 2025. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis wirausaha sektor kelautan dan perikanan baik yang sudah ekisting maupun wirausaha baru sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya. Triwulan I - III tahun 2025 output dari kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha hasil KP sebanyak 115 wirausaha sektor kp.





Gambar 3. 10 Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha kelautan dan perikanan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp601.784.563,- atau setara dengan 56,41% dari total pagu sebesar Rp1.066.728.000,-. Penggunaan anggaran pada triwulan III ini lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi, sehingga penyerapan anggaran pada triwulan III ini lebih besar daripada capaian kegiatan mencapai 36% dengan penggunaan anggaran sebesar 56,41%.

IK4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan

Fasilitasi pengembangan kelembagaan merupakan titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 fasilitasi pengembangan kelembagaan dilakukan melalui: penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum, fasilitasi pembentukan lembaga usaha berbadan hukum, identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya, perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan, penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi, fasilitasi perluasan akses pasar dan kemitraan dengan pelaku

usaha/lembaga usaha lain serta monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha untuk dapat diketahui peningkatan kinerjanya. Untuk mengetahui peningkatan kinerja lembaga usaha, telah dilakukan evaluasi kinerja awal melalui pendataan kepada unit koperasi terpilih yang kemudian akan dibanding dengan hasil evaluasi kinerja di akhir tahun.

Kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan tahun 2025 merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan target capaian ditetapkan sebanyak 22 lembaga dan target capaian peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan sebesar 6% yang akan disampaikan pada akhir tahun anggaran. Namun, selama pelaksanaan kegiatan, terjadi penyesuaian anggaran melalui mekanisme *automatic adjustment*. Penyesuaian ini berdampak pada pengurangan alokasi anggaran kegiatan, sehingga target capaian perlu disesuaikan menjadi 6 lembaga. Jumlah fasilitasi pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan pada triwulan III tahun 2025 telah mencapai 1 lembaga usaha, dengan total capaian keseluruhan sejak triwulan I adalah 4 lembaga usaha yaitu telah mencapai 100%.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan III 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)												

Pada triwulan III, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1) Launching Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada tanggal 21 Juli 2025

Dalam rangka Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh presiden secara hybrid, dilakukan pendampingan kepada masing-masing mock up di Wilayah IV yang telah ditentukan, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, bersama ini kami laporkan kegiatan sebagai berikut:

- a. Acara launching akan diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara offline di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan secara online dengan menampilkan 103 mock up/percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari seluruh wilayah Indonesia. Launching akan diikuti oleh 83 ribu kades seluruh Indonesia, 80 ribu BPD, 514 bupati dan 38 gubernur.
- b. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan ditugaskan menjadi Ketua Pelaksana Harian Wilayah IV yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Dari 103 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Percontohan (Mock Up), Wilayah IV memiliki 19 koperasi mock up terpilih yang terdiri dari 9 mock up Jawa Timur, 6 mock up Bali, 2 mock up NTB dan 2 mock up NTT.
- c. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Percontohan (Mock Up) harus memiliki 7 unit usaha wajib yaitu kantor koperasi, unit usaha simpan pinjam, unit usaha sembako, unit usaha klinik desa, unit usaha apotek desa, unit usaha gudang/cold storage dan unit usaha logistik.
- d. Terdapat 4 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipilih untuk lokasi utama yang akan dihadiri oleh Gubernur yaitu KDMP Pucangan - Tuban, KDMP Kutuh, Denpasar, KDMP Bilelendo – NTB dan KDMP Penfui Timur, Kupang.
- e. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan meminta tim untuk dapat membagi penugasan pada saat peresmian tanggal 21 Juli 2025 yaitu:
 - Ditjen PDS : NTT
 - Ditjen Perikanan Tangkap : Bali
 - Ditjen Perikanan Budidaya : NTB

- BBPSDMKP : Jawa Timur
- f. Masing-masing PIC diminta untuk dapat mengawal kesiapan peresmian, kelengkapan gerai dan kesiapan satgas provinsi dan kabupaten/kota untuk menghadiri peresmian. Dan dapat berkoordinasi secara intensif dan hadir di lokasi minus H2.
- g. Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, NTT, telah mempersiapkan Koperasi Merah Putih sejak April 2025 dan telah menyiapkan unit sebagai berikut:
 - Unit simpan pinjam, dengan rencana kerja sama bersama Bank Mandiri.
 - Gerai sembako menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, terigu, gula, dan bawang putih, serta bermitra dengan Perum BULOG.
 - Layanan kesehatan, berada dalam satu bangunan dengan kantor koperasi, bekerja sama dengan Puskesmas Pembantu untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
 - Layanan apotek, menyediakan obat-obatan setingkat Puskesmas Pembantu, menjalin kerja sama dengan PT. Kimia Farma.
 - Usaha logistik didukung oleh 2 unit kendaraan roda tiga, 2 unit pick-up, 2 unit dump truck, dan 1 unit tangki air, serta bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia dalam layanan pengiriman drop point.
 - Gudang kering berukuran 10 x 10 meter dengan kapasitas 10 ton, untuk menyimpan beras, pupuk, gas, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, tersedia gudang beku berupa truk berpendingin (refrigerasi) dengan kapasitas 6 ton untuk penyimpanan buah dan sayur.



Gambar 3. 11 Launching Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada tanggal 21 Juli 2025

2) Sosialisasi pembuatan proposal bisnis dan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Satgas Nasional dan Daerah serta HIMBARA pada tanggal 11 September 2025

- a. Sosialisasi dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha. Narasumber pada pertemuan ini adalah Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi – Kementerian Koperasi yang menjelaskan tata cara pembuatan akun dan pengisian profil koperasi (Pengurus, Gerai Usaha, Potensi desa, dan peta lokasi) dan perwakilan Danantara yang menjelaskan cara penyusunan proposal bisnis, berlaku sebagai moderator adalah Asisten Deputi Tata Niaga Pangan Dalam Negeri - Kemenko Pangan.
- b. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mendaftarkan akun untuk dapat mengakses SIMKOPDES dan melakukan registrasi dan pengisian data secara online. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mempersiapkan data legalitas, baik untuk mendaftar menjadi agen BUMN maupun pengajuan bisnis atau pengajuan kredit ke bank. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga harus menyusun proposal bisnis dan memastikan proposal bisnis harus mendapat persetujuan dari Bupati/walikota atau kepala desa melalui Musdesus sebelum pengajuan pembiayaan/kredit ke bank.
- c. tahapan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan, yaitu pendaftaran dan verifikasi pada akun simkopdes pengajuan paket kemitraan, penyusunan Proposal Bisnis, persetujuan Bupati/Walikota/Kades, persetujuan Musyawarah Desa Khusus, penyerahan Persyaratan Pinjaman Ke Bank, perjanjian Kredit, pengajuan Permohonan Pencairan, dan pengerjaan Proyek dan Pencairan Kredit.
- d. Tutorial pengisian proposal bisnis meliputi:
 - Pengisian data identitas koperasi secara otomatis (sudah di-generate melalui sistem SIMKOPDES)
 - Rencana kegiatan dan penggunaan dana (belanja modal dan modal kerja)
 - Memilih paket pembiayaan (kecil, sedang, dan besar)
 - Mendapat jumlah plafon yang bisa didapat (modal kerja dan modal investasi)
 - Mengisi rencana penggunaan dana

- Mengisi rencana pendapatan berdasarkan paket pembiayaan (jenis Kerjasama dengan BUMN Himbara)
 - Rencana pengembalian pinjaman
 - Pernyataan pengurus, wajib diisi sebagai bentuk komitmen koperasi dalam pengajuan pinjaman ke bank.
- e. Pengurus Kopdeskel Merah Putih dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan Dinas Koperasi dan himbara setempat untuk proses pengisian simpkopdes dan pengajuan proposal bisnis.



Gambar 3. 12 Sosialisasi pembuatan proposal bisnis dan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Satgas Nasional dan Daerah serta HIMBARA pada tanggal 11 September 2025

3) Rapat koordinasi penyusunan data base Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 September 2025

Dalam rangka memperkuat basis data dan penyusunan laporan terkait operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih khususnya sektor Kelautan dan Perikanan, telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan database Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami laporkan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembahasan dilakukan pada aspek pengembangan data dan tampilan laporan sektor kelautan, dan perikanan dan difokuskan pada penyusunan detail tema sektor Kelautan dan Perikanan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta unit usaha perikanan yang relevan. Hal ini diperlukan untuk menentukan peran KKP pada pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- b. KBLI perikanan beserta jenis-jenis usaha perikanan menjadi acuan dalam pendataan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan usaha anggota. Fokus diberikan pada identifikasi koperasi yang anggotanya berasal dari kelompok

kelautan dan perikanan, sehingga data yang ditampilkan lebih spesifik dan sesuai sasaran pembinaan.

- c. Laporan yang akan ditampilkan diarahkan agar menampilkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor KP, dengan tambahan keterangan pada peta untuk mempermudah visualisasi lokasi koperasi. Penggunaan fitur advance filter diusulkan agar penyaringan data lebih optimal, memungkinkan pengguna memilih kategori koperasi atau unit usaha sesuai kebutuhan analisis.
- d. Diharapkan dapat berintegrasi dengan aplikasi Bantuan Pemerintah KKP pada sistem Kopdeskel. Menu ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi terkait data koperasi sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mempermudah proses monitoring dan evaluasi.
- e. Sebagai tindak lanjut, akan disusun laporan/dashboard rekap data yang menampilkan informasi secara ringkas, akurat, dan terintegrasi. Dashboard tersebut dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan KDKMP sektor KP.



Gambar 3. 13 Rapat koordinasi penyusunan data base Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 September 2025

4) Menghadiri Musyawarah Desa Khusus dengan mengundang 239 Kopdeskel Merah Putih pada tanggal 24 September 2025

Dalam rangka pemberian dukungan Kepala Desa terhadap pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melaksanakan Musyawarah

Desa Khusus (Musdesus) Serentak pada tanggal 25 September 2025, hasil dari pembahasan adalah :

- a. Sampai tanggal 25 September 2025 telah terbentuk badan hukum KDKMP sebanyak 81.625 unit. Target nasional untuk operasionalisasi KDKMP Tahap I sebesar 16.116 unit, khusus untuk Wilayah IV sebesar 5.412 unit
- b. Sebagai tindak lanjut dari launching peresmian KDKMP, yaitu Etape II – operasionalisasi dan pengembangan KDKMP dalam rangka pembiayaan, dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Musyawarah Pembangunan Kelurahan untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- c. Arahan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada para Kepala Desa dan pengurus KDMP untuk secara serius memanfaatkan dukungan pembiayaan dan tidak memberikan beban baru bagi desa, sehingga tidak akan terjadi kredit macet yang berimbas pada penggunaan 30% pagu dana desa yang dijadikan jaminan. Bila dalam operasionalisasinya KDMP tidak menyentuh 30% dari pagu dana desa untuk mengembalikan pinjaman, menunjukkan bahwa KDMP sukses menggerakkan ekonomi desa. Desa juga akan mendapat imbal jasa sebesar 20% dari keuntungan KDMP yang digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, memajukan ekonomi desa, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Mekanisme persetujuan Kepala Desa/Lurah untuk usulan pinjaman KDKMP, yaitu:
 - KDKMP melakukan musyawarah untuk membuat proposal pembiayaan;
 - Proposal disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah;
 - Untuk KDMP, Badan Permusyawaratan Desa melakukan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh BPD, KDMP, masyarakat, Pemerintah Desa dan tokoh penting desa yang membahas besaran maksimal pinjaman dan besaran maksimal dukungan pengembalian pinjaman (paling tinggi 30% dana desa) yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Berita Acara Musyawarah Pembangunan Kelurahan;
 - Untuk KDMP, Surat Persetujuan akan ditandatangani oleh Kepala Desa, sedangkan untuk KKMP Surat Persetujuan akan ditandatangani oleh Bupati/Walikota. Surat Persetujuan akan disampaikan KDKMP ke bank;
 - Dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman bersamaan dengan Surat Kuasa Penempatan Dana yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah;

- Semua dokumen diunggah ke SIMKOPDES oleh pengurus KDKMP didampingi oleh PIC Satgas dan HIMBARA dan diharapkan selesai pada tanggal 6 Oktober 2025;
 - Surat Kuasa Kepala Desa diunggah ke dalam OM-SPAN TKD;
 - Bila disetujui, dilakukan pencairan ke rekening penerimaan pinjaman.
- e. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan secara rinci terkait SIMKOPDES yang wajib dimiliki oleh KDKMP, yang menjadi syarat dalam tahapan pengajuan proposal pembiayaan. Selanjutnya seluruh KDKMP yang telah mengikuti Musdesus akan didampingi penyusunan proposal bisnisnya sampai operasionalisasinya oleh HIMBARA yang menjadi mitra di wilayahnya masing-masing.
- f. Pembiayaan yang diperoleh KDKMP dimungkinkan juga untuk dilakukan kemitraan dengan swasta, UKM atau lembaga ekonomi lainnya, yang model bisnisnya akan dirancang oleh Kementerian Koperasi dan tercakup dalam SIMKOPDES.
- g. Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Telah diterbitkan Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN terkait teknis penempatan P3K paruh waktu dan penuh waktu untuk mendorong akselerasi operasionalisasi KDKMP;
 - Penempatan P3K tidak dibatasi hanya disiplin ilmu ekonomi dan manajemen;
 - Penempatan P3K diprioritaskan kepada KDKMP yang sudah aktif yang sedang dipetakan oleh BKN yang pertama dilakukan untuk P3K untuk penuh waktu;
 - Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB akan melakukan sosialisasi kepada Kepala Daerah tentang teknis penempatan P3K dan sosialisasi bisnis proses persetujuan Kepala Daerah untuk usulan pinjaman KDKMP, terutama tentang opsi pengisian aset desa/kota yang bisa dijadikan aset KDKMP; dan
 - Akan melakukan aktivasi satgas Kecamatan, karena Satgas Kecamatan yang paling mengetahui peta permasalahan di daerah dan pro aktif teknis penempatan P3K.

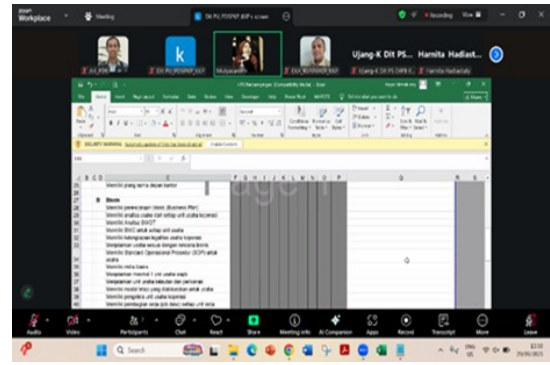


Gambar 3. 14 Musyawarah Desa Khusus dengan mengundang 239 Kopdeskel Merah Putih pada tanggal 24 September 2025

5) Pembahasan Rencana Pendampingan Bisnis untuk KDKMP Terpilih pada tanggal 29 September 2025

Dalam rangka memperkuat implementasi dan keberlanjutan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dilakukan persiapan pembinaan pendampingan KDKMP, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tujuan utama rapat adalah merumuskan mekanisme pendampingan, menyusun materi pembekalan, serta menetapkan lokasi KDKMP yang akan menjadi target pendampingan. Kegiatan akan bekerjasama dengan PT. Breto Institute sebagai calon pendamping. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah beroperasionalnya minimal satu unit bisnis operasional wajib dan bisnis sektor kelautan dan perikanan di setiap KDKMP terpilih.
- b. Kriteria tim pendamping adalah tenaga pendamping bisnis yang berdomisili berdekatan dengan KDKMP yang memiliki pengalaman dalam pendampingan bisnis dan/atau pendampingan koperasi. Dalam melakukan kegiatan pendampingan, tim pendamping akan bekerja sama dengan Dinas KP, Dinas Koperasi, penyuluh perikanan dan *business assistant*. Dan harapannya, penyuluh perikanan dapat belajar terkait pendampingan koperasi dan melanjutkan proses pendampingannya.
- c. Dalam 1 Provinsi terdapat 2 Kabupaten, dan dalam 1 Kabupaten terpilih, akan ditentukan 3 KDKMP dengan satu pendamping. Sehingga total dari 4 Provinsi, yaitu Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT terdapat 24 KDKMP terpilih yang akan didampingi.
- d. Syarat KDKMP terpilih yaitu:
 - KDKMP memiliki unit usaha/potensi kelautan dan perikanan;
 - KDKMP telah memiliki kantor; dan
 - KDKMP bersedia dan berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pendampingan
- e. Lokasi pendampingan yang dipilih yaitu sebanyak 8 kabupaten terdiri dari Gresik, Pasuruan, Tabanan, Badung, Lombok Timur dan Lombok Tengah, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
- f. Rangkaian kegiatan terdiri dari penguatan kelembagaan, identifikasi peluang usaha yang akan dikembangkan, pendampingan bisnis dan evaluasi keberlanjutan.



Gambar 3. 15 Pembahasan Rencana Pendampingan Bisnis untuk KDKMP Terpilih pada tanggal 29 September 2025

Untuk mendukung pengembangan usaha lembaga diperlukan dukungan berupa fasilitasi kemitraan usaha. Fasilitasi kemitraan usaha ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

1. Pembahasan Model Bisnis Sentra Pengolahan Ikan Asin Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada tanggal 22 September 2025

- a. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Generasi Emas 2045, untuk meningkatkan kesejahteraan anak, perempuan, dan keluarga nelayan/pelaku usaha perikanan, dengan salah satu fokusnya mensejahterakan pelaku usaha di sentra pengolahan ikan asin Kelurahan Kalibaru melalui kemitraan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kalibaru dalam hal pemasaran produk ikan asin.
- b. Kondisi sentra pengolahan ikan asin kalibaru saat ini perlu diberikan penyuluhan dan edukasi untuk menghasilkan produk perikanan yang sesuai standar dan membangun ekosistem usaha yang lebih baik. Diharapkan setelah dilakukan kegiatan ini, sentra pengolahan ikan asin Kalibaru dapat menjadi percontohan bagi sentra ikan asinnya lainnya.
- c. Untuk mendukung pengembangan sentra pengolahan ikan asin Kalibaru, telah dilakukan kerja sama dengan PT. Alderon Pratama Indonesia berupa pemberian bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu *Solar Dryer Dome* yang berfungsi untuk mengeringkan ikan dalam lingkungan yang terlindungi.
- d. Wakil Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkenan untuk meresmikan *Solar Dryer Dome* (SDD) tersebut yang akan

didahului dengan pemaparan tentang profil Kelompok Pengolah dan Pemasar Bersama Maju yang akan memanfaatkan SDD dan pemaparan model bisnis yang akan dijalankan di sentra pengolahan ikan asin Kalibaru.

- e. Sebagai percontohan penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Kelompok Pengolah dan Pemasar Bersama Maju telah mendapatkan Serifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), yang mendapatkan perhatian dari pelaku usaha lainnya untuk mulai menerapkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- f. Sebagai pengalaman CSR dengan bentuk bantuan yang sama, yaitu SDD di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan produk ikan selar, perlu pembelahan ikan sebelum dikeringkan menggunakan SDD untuk mendapatkan produk akhir sesuai yang diharapkan. Berdasarkan pengalaman tersebut, untuk mendapatkan pemanfaatan yang optimal dari SDD, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan uji coba perlakuan sebelum dan/atau sesudah pengeringan, untuk mendapatkan produk akhir sesuai standar mutu;
 - Melakukan fasilitasi pembiayaan dengan lembaga keuangan, misal BRI;
 - Menyusun proses bisnis, rencana usaha dan target pasar (ritel indomart dll); dan
 - Menyusun jadwal pelatihan dan pendampingan, seperti pelatihan pemasaran online dapat melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi;
- g. Untuk mendukung rantai pasok dan mempertahankan mutu ikan asin yang dihasilkan, dibutuhkan *chilling room* untuk menyimpan produk akhir sebelum dipasarkan. Koperasi Kelurahan Merah Putih Kalibaru telah memiliki bangunan yang dapat dipergunakan sebagai lokasi penempatan *chilling room*, dan perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk melihat kelayakan kesesuaiannya untuk *chilling room*.



Gambar 3. 16 Pembahasan Model Bisnis Sentra Pengolahan Ikan Asin Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada tanggal 22 September 2025

2. Pertemuan Pembahasan Model Bisnis Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan Asin di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 23 September 2025

Dalam rangka pembahasan lanjutan Pembahasan Model Bisnis Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan Asin di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, dilakukan pembahasan dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

- 1) Pertemuan dipimpin oleh Wamen PPPA dan dihadiri oleh Asdep Rantai Pasok - Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Kementerian Koperasi, Direktur Pengolahan - Ditjen PDSPKP KKP, Direktur Pemberdayaan Usaha - Ditjen PDSPKP KKP, perwakilan Kedeputan Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, PT. Alderon Pratama Indonesia, Camat Cilincing, Lurah Kalibaru, Ketua RW 04 Kelurahan Kalibaru, Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Kalibaru dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Bersama Maju;
- 2) Agenda pertemuan membahas rencana model bisnis pengembangan usaha pengolahan ikan asin dengan memanfaatkan *Solar Dryer Dome* (SDD) di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, yang merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian PPPA dan PT Alderon Pratama Indonesia;
- 3) Pokok arahan Ibu Wamen PPPA adalah sebagai berikut :
 - a. Tujuan dari pemberian sarana produksi berupa *Solar Dryer Dome* (SDD) dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Alderon Pratama Indonesia adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui program pemberdayaan usaha yang ditujukan untuk perempuan pengolah ikan asin.
 - b. Penting untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan baik agar pemanfaatan *Solar Dryer Dome* (SDD) dan sarana pendukung lainnya benar-benar optimal. Untuk itu perlu disiapkan gambaran proses bisnis yang jelas, baik sebelum maupun sesudah intervensi dari kementerian/lembaga terkait. Dengan pemetaan tersebut, setiap intervensi yang diberikan akan terarah dan berdampak langsung pada penguatan kelompok pengolah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

- c. Produk yang dihasilkan perlu dipastikan berkualitas, sehingga diperlukan uji coba pengolahan ikan asin menggunakan SDD hingga tercapai mutu sesuai permintaan pasar. Selama proses uji coba tersebut, penyedia SDD diminta mendampingi agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti, sekaligus memastikan peralatan yang diserahkan dapat digunakan secara optimal oleh kelompok.
- d. Langkah strategis yang perlu dilakukan yaitu :
 - memastikan keberlanjutan suplai bahan baku dan pasar;
 - kapasitas manajemen usaha beserta literasi keuangan; serta
 - menjamin kualitas produk agar mampu menembus pasar premium.
- e. Kolaborasi antara Kementerian PPPA, KKP, Kemenkop, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan usaha, diantaranya ketersediaan modal, transfer teknologi, dan akses pasar, agar kegiatan kolaborasi ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok dan masyarakat.
- f. Model pengembangan bisnis yang ditawarkan adalah dengan adanya kemitraan usaha antara Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kalibaru dengan kelompok pengolah dan pemasaran ikan asin Bersama Maju selaku penerima SDD. KKMP Kalibaru berperan sebagai agregator yang menampung dan memasarkan produk pengolah anggota, sementara kelompok pengolah akan memproduksi ikan asin dengan memanfaatkan SDD sehingga dapat menghasilkan produk ikan asin kualitas premium. Untuk menampung produk ikan asin sekaligus menjaga mutu produk, Ketua KKMP menyampaikan kebutuhan penyediaan gudang beku.
- g. Perwakilan KKP menyampaikan akan melakukan pendampingan dalam proses pengolahan ikan teri sampai dengan menghasilkan produk teri yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain hal tersebut, diperlukan pengujian ikan asin hasil pengolahan menggunakan SDD untuk memperkuat perhitungan biaya, harga jual, dan proyeksi pendapatan, sekaligus menjadi bukti pemenuhan standar mutu.
- h. Akan dilakukan uji coba pemanfaatan SDD dengan didampingi oleh Kementerian PPPA, PT. Alderon Pratama Indonesia dan Tim Direktorat Pengolahan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja kelembagaan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 87.396.300,- atau setara dengan 70,85% dari total pagu sebesar Rp. 123.346.000,- .

IK5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Melalui Kredit Program

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Nilai realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan adalah nilai realisasi pembiayaan yang berasal dari 2 jenis data penyaluran kredit, yaitu:

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Data realisasi KUR dimonitor secara berkala melalui Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan yang diolah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan, baik subsektor hulu maupun hilir.

b. Kredit Ultra Mikro (Kredit UMi)

Data realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) diperoleh secara berkala dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Pegadaian sebagai lembaga non bank yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Direktorat Pemberdayaan usaha menargetkan nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2025 sebesar Rp 7,99 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat pemberdayaan usaha terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan sosialisasi dan literasi keuangan.

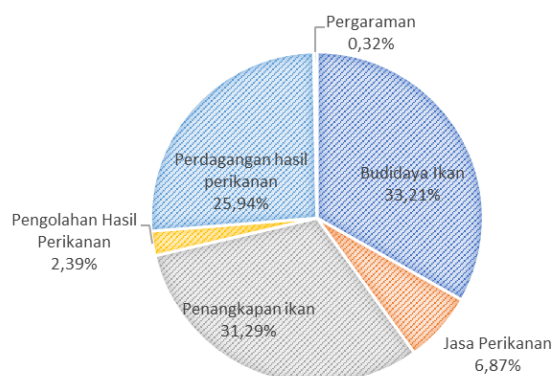
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program Triwulan III 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2025
	TW III 2025	TW IV 2024	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW IV 2024	TW III 2024	S.d Tahun 2025	TW III 2025	TW IV 2024	TW III 2024	
Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	5,5	10,26	7,7	7,99	5,62	7,77	6,13	3,56	102,18	54,77	72,98	70,33

Realisasi Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada Triwulan III sebesar Rp. 5,62 Triliun kepada 256.098 Debitur yang terdiri atas Rp. 4,7 Triliun kepada 91.304 Debitur bersumber dari KUR usaha KP dan Rp. 0,92 Triliun kepada 164.794 Debitur bersumber dari Kredit UMi.

Capaian nilai pembiayaan sebesar Rp. 5,62 Triliun jika dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar Rp. 5,5 Triliun maka tercapai sebesar 102,18% atau setara dengan 70,33% dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 7,99 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 maka capaian nilai pembiayaan pada Triwulan III tahun 2025 mengalami penurunan sebesar - 8,32%.

Realisasi nilai kredit program apabila di bandingkan per sektor usaha kelautan dan perikanan maka pada sektor usaha budidaya terealisasi sebesar 33,21% atau Rp1,86 Triliun kepada 77.509 debitur; sektor penangkapan ikan terealisasi sebesar 31,29% atau Rp1,76 Triliun kepada 138.608 debitur; sektor perdagangan kelautan dan perikanan sebesar 25,94% atau Rp1,45 Triliun kepada 29.101 debitur, sektor jasa perikanan sebesar 6,87% atau Rp0,38 Triliun kepada 8.475 debitur; sektor pengolahan perikanan sebesar 2,39% atau Rp0,13 Triliun kepada 2.274 debitur dan sektor pergaraman sebesar Rp0,01 Triliun kepada 131 debitur.



Gambar 3. 17 Gambar Realisasi Kredit Program Berdasarkan Sektor Usaha Perikanan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III untuk mendukung capaian tersebut antara lain:

1) Fasilitasi Pembiayaan dan Literasi Keuangan di Kota Surakarta tanggal 22 Juli 2025

Dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional, khususnya pilar *UMKM naik kelas* dan penguatan sektor pangan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan intervensi yang terintegrasi antara akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan. Fasilitasi ini selaras dengan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong ekonomi biru dan pemerataan kesejahteraan pelaku usaha melalui:

- Akses terhadap pembiayaan produktif, termasuk pembiayaan syariah.
- Penguatan kapasitas manajerial melalui edukasi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
- Peningkatan kualitas usaha UMKM sektor kelautan dan perikanan di Solo Raya

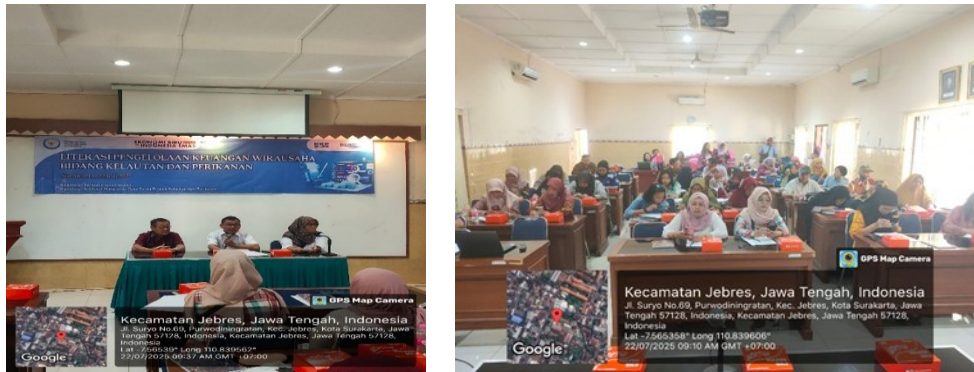
Kegiatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan pembiayaan produktif dan peningkatan kapasitas pencatatan keuangan, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendukung terbentuknya kelembagaan ekonomi kolektif dalam bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sektor kelautan dan perikanan.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas memberikan apresiasi atas pelaksanaan fasilitasi dan menyampaikan bahwa mayoritas pelaku usaha perikanan di wilayahnya merupakan usaha mikro di bidang budidaya, pembenihan, dan pengolahan, yang masih menghadapi kendala akses permodalan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemberdayaan Usaha mendorong agar UMKM sektor kelautan

dan perikanan bergabung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memperkuat usaha dan akses pembiayaan melalui skema khusus setara KUR. UMKM juga diharapkan melakukan pencatatan keuangan secara tertib sebagai dasar pemantauan perkembangan usaha.

Kegiatan menghadirkan beberapa narasumber yakni dari (1) Katimja Pelayanan dan Kemitraan Usaha; (2) PT. Alami Fintek Sharia; (3) Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Pendampingan Penyusunan laporan keuangan usaha dilakukan oleh Ibu Handayani dari Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur beserta Dit. Pemberdayaan Usaha dan penyuluh perikanan kota Surakarta.
- pendampingan penyusunan laporan keuangan usaha diberikan kepada 30 UMKM dengan rincian 7 UMKM belum memiliki laporan keuangan, dan 23 UMKM baru memiliki laporan keuangan sangat sederhana.
- Penyusunan Laporan keuangan usaha yang disusun meliputi jumlah produksi, pencatatan biaya operasional, biaya investasi, penentuan harga jual, jumlah pendapatan dan omset.
- UMKM diberikan format laporan keuangan usaha sederhana melalui matriks pembukuan berbentuk file excel, dimana UMKM tinggal memasukkan data-data transaksi keuangan kemudian secara otomatis akan terhitung dan tercatat perkembangan usahanya.
- Selain dalam bentuk matriks excel sederhana, UMKM juga diajarkan Menyusun laporan keuangan secara digital melalui aplikasi *Zahir Accounting*. aplikasi ini dapat membantu UMKM untuk menginput dan memantau transaksi keuangannya secara real time dimana saja melalui smartphonanya. aplikasi ini dapat memfasilitasi UMKM yang memiliki lebih dari 1 produk yang dihasilkan dengan pencatatan transaksi yang terpisah, hanya saja aplikasi ini tidak bisa dinikmati secara gratis, dibutuhkan biaya untuk berlangganan aplikasi tersebut.
- Outcome dari kpendampingan ini adalah 30 UMKM tersebut telah meningkat kompetensinya dalam hal literasi dan pencatatan keuangan usaha serta memiliki laporan keuangan usaha yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar 3. 18 Fasilitas Pembiayaan dan Literasi Keuangan di Kota Surakarta tanggal 22 Juli 2025

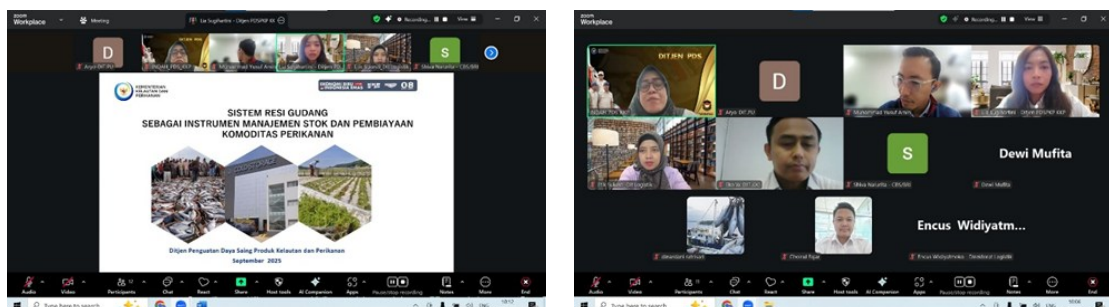
2) Rapat koordinasi pembiayaan bagi pengelola Sistem Rantai Gudang pada tanggal 22 September 2025

Dalam rangka akselerasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui penguatan akses pembiayaan bagi pengelola Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 22 September 2025 menyelenggarakan rapat koordinasi Akses Pembiayaan bagi Pengelola Sistem Resi Gudang Komoditas Kelautan dan Perikanan, dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan dihadiri oleh tim kerja pemantauan dan tim kerja penyimpanan Direktorat Logistik serta *Small and Medium Business Division*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah untuk membahas perkembangan pelaksanaan SRG komoditas perikanan, mengidentifikasi kebutuhan dan kendala pembiayaan SRG dan menyusun langkah konkret agar SRG dapat mengakses kredit produktif/KUR/pembiayaan investasi.
- Perkembangan Sistem Resi Gudang (SRG) komoditas perikanan saat ini mencakup komoditas ikan, udang, telur ikan terbang, rumput laut, serta produk olahan seperti tepung agar dan karagenan. Selain itu, telah diusulkan komoditas baru berupa ikan kayu dan ikan asap ke BAPPEBTI untuk dianalisis manfaatnya. Hingga kini terdapat 33 SRG yang terdiri atas 20 gudang rumput laut dan 13 gudang ikan, dengan sebaran terbanyak di Sulawesi Selatan. Dari NTT juga muncul usulan dua unit pengolahan rumput laut untuk menjadi pengelola SRG.
- Total pembiayaan resi gudang komoditas kelautan dan perikanan sejak tahun 2020 – 2025 sebesar Rp.322,78 Miliar yang terdiri dari resi gudang rumput laut sebesar Rp.165,18 Miliar dan Komoditas Ikan sebesar Rp.157,60 dengan

penyaluran pembiayaan terbesar saat ini masih didominasi oleh Bank BJB. Jumlah realisasi pembiayaan resi gudang tahun 2025 sebesar Rp4 Miliar, masih sangat kecil dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.59,86 Miliar, atas kondisi tersebut dipandang perlu untuk memfasilitasi akses pembiayaan kepada pengelola sistem resi gudang.

- Dalam pembiayaan SRG, Bank BRI memiliki 2 Skema pembiayaan, yaitu skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan plafon maksimal Rp 500 juta atau 70% dari nilai resi, tanpa biaya provisi dan administrasi dengan tenor hingga 12 bulan, dan skema komersial tidak ada batas plafon dengan porsi pembiayaan sama, provisi 0,75–1,25%, biaya administrasi Rp 750 ribu, dan bunga sekitar 12,5%. Target penyaluran SSRG BRI tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 60 miliar. Namun hingga Agustus 2025 baru tersalurkan sebesar Rp10,27 Miliar. Penyaluran terbesar tercatat di KC Probolinggo untuk komoditas ikan sebanyak 20 debitur dengan nilai Rp 9,91 miliar, serta di KC Masamba Sulawesi Selatan untuk komoditas rumput laut sebesar Rp 360 juta dengan 3 debitur. Bank BRI sangat tertarik untuk menyalurkan pembiayaan dengan Skema SSRG, karena plafon yang tersisa masih sekitar Rp.50 Miliar untuk dimanfaatkan pelaku usaha.
- Untuk Skema Komersil, bank BRI berencana untuk memulai kembali pembiayaan pada tahun 2026, setelah melakukan evaluasi dikarenakan pada tahun ini terdapat kendala untuk pembiayaan SRG di Makassar yang memperlihatkan kelemahan tata kelola gudang, seperti kehilangan barang, tidak adanya pemisahan antar bank, dan mutu komoditas yang meragukan.
- Langkah strategis yang disepakati dalam rapat meliputi pemetaan dan profiling pengelola gudang untuk memastikan kelengkapan legalitas, kapasitas, omzet, dan kebutuhan pembiayaan; diikuti dengan sosialisasi dan fasilitasi pembiayaan SRG kepada pengelola gudang serta pelaku usaha.



Gambar 3. 19 Rapat Sosialisasi dan Fasilitasi Pembiayaan SRG

3) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II, 29 Juli 2025

Dalam rangka akselerasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui Kredit Program dan sinergi kegiatan antar anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 29 Juli 2025 menyelenggarakan rapat koordinasi Pokja Kredit Program Triwulan II di Ruang Rapat Arwana, Gd Mina Bahari II lantai 14, dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan dihadiri oleh anggota Pokja lingkup KKP yaitu perwakilan dari Sekretariat Jenderal KKP, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDMKP, serta perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian dan lembaga keuangan yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BSI, PT.PNM, dan PT.Pegadaian.
2. Rapat bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kinerja penyaluran pembiayaan kredit program sektor KP periode Triwulan II 2025 dan menyusun langkah percepatan akses pembiayaan pada Triwulan III 2025.
3. Total realisasi Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II 2025 sebesar Rp3,57 Triliun yang disalurkan kepada 142.781 debitur, atau setara dengan 44,68% dari target nilai pembiayaan 2025 sebesar Rp7,99 Triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (YoY) nilai realisasi pembiayaan menurun 10,11%, namun jumlah debitur meningkat 6,06%. Rincian bidang usaha penerima kredit program yaitu budidaya ikan (33,40%), penangkapan ikan (29,61%), perdagangan hasil perikanan (27,10%), jasa perikanan (6,96%), pengolahan hasil perikanan (2,55%), dan pergaraman (0,39%).
4. Direktorat Pemberdayaan Usaha menyampaikan informasi potensi pembiayaan kepada lembaga keuangan terkait program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sinergi program pembentukan ekosistem pembiayaan berbasis komunal, serta fasilitasi pembiayaan kepada 13 koperasi pengelola gudang beku.
5. Data penyaluran KUR dari bank Himbara dan lembaga keuangan non bank hingga Triwulan II 2025 dapat dirinci sebagai berikut:
 - BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp2,28 Triliun kepada 54.145 debitur.

Penyaluran KUR SKP mengalami penurunan sebesar 26,45% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY), yang berasal dari sektor perdagangan dan industri perikanan. Sebagai upaya percepatan penyerapan KUR, BRI akan memaksimalkan penyaluran di sektor hulu KP. BRI mencatat nilai NPL KUR SKP hingga tahun ini sebesar 3,6, namun untuk tahun berjalan nilai NPL 0.

- Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp354,81 Miliar kepada 3.341 debitur, dan dibandingkan dengan periode sebelumnya (YoY) penyaluran KUR menurun sebesar 16,31%. Bank Mandiri mencatat nilai NPL KUR SKP hingga tahun ini sebesar 2,1 (diatas nilai NPL rata-rata sektor lain sebesar 1), sedangkan untuk tahun berjalan nilai NPL 0.
- BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp97,69 Miliar kepada 435 debitur, dan dibandingkan dengan periode sebelumnya (YoY) penyaluran KUR menurun sebesar 44,23%. BNI mencatat nilai NPL KUR SKP hingga tahun ini sebesar 2,1. Penyaluran KUR SKP oleh BNI menunjukkan tren penurunan dikarenakan rendahnya literasi keuangan, tingginya resiko kredit, faktor resiko alam dan ketidakpastian usaha, serta keterbatasan kepada akses lembaga keuangan.
- BSI telah menyalurkan KUR sebesar Rp106,18 Miliar kepada 921 debitur, dibandingkan dengan periode sebelumnya (YoY), penyaluran KUR menurun sebesar 38,69%. BSI mencatat nilai NPL KUR SKP mencapai 6,8%, dan saat ini BSI fokus kepada perbaikan kualitas kredit dan mencegah potensi kredit macet sehingga pencairan KUR SKP di beberapa kantor cabang BSI ditunda.
- PT. PNM telah menyalurkan Kredit Ultra Mikro sebesar Rp456,03 Miliar kepada 80.357 debitur, dibandingkan dengan periode sebelumnya (YoY), penyaluran KUR meningkat sebesar 39,34%. Salah satu bentuk sinergi program pengembangan Ekosistem Pembiayaan Usaha berbasis Komunal dengan KKP adalah pembentukan kampung madani berbasis produk perikanan di Desa Sarangmeduro Kabupaten Rembang, yang ditunjukkan melalui pertumbuhan jumlah debitur dari 533 orang (Tahun 2024) menjadi 573 orang (Mei 2025), serta peningkatan plafon kredit dari Rp4,9 juta menjadi Rp5,6 juta per orang.

- PT. Pegadaian telah menyalurkan KUR dan Kredit Ultra Mikro sektor KP sebesar Rp44 Miliar, dengan *outstanding* penyaluran KUR dan Umi untuk semua sektor mencapai Rp2,1 Triliun, menurun dibanding tahun 2024 sebesar Rp2,5 Triliun. Menurunnya kinerja pembiayaan dikarenakan penurunan laju konsumsi dan pendapatan masyarakat. Pegadaian mencatat nilai NPL sektor KP hingga saat ini masih sangat bagus dengan nilai 0.
6. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian menyampaikan informasi sebagai berikut:
- Total plafon KUR nasional pada tahun 2025 sebesar Rp287 Triliun, dan hingga Juli 2025 telah terdistribusi sebesar Rp155 Triliun.
 - Tren penurunan KUR SKP terjadi sejak Triwulan 4 2024 yaitu sebesar 34,4%, Triwulan I 2025 turun sebesar 9,9%, dan Triwulan II 2025 turun sebesar 14,47%.
 - Penurunan ini diperkirakan karena adanya pergeseran fokus penyaluran ke sektor pertanian yang meningkat sebesar 37%, sebagai akibat pemberlakuan skema KUR khusus dan relaksasi sektor pertanian, seperti kredit untuk Alsintan dan komoditas tebu.
7. Dalam kesempatannya anggota pokja lingkup eselon I KKP menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan kegiatan Literasi Keuangan dan Sosialisasi Produk Perbankan kepada nelayan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dengan mengundang Bank Himbara, BPD, Dinas Perikanan daerah, dan penyuluh. Penjaringan calon debitur potensial dilakukan dengan membagikan form online pendataan calon debitur potensial ke seluruh Dinas dan penyuluh.
 - Ditjen Perikanan Budidaya telah menginisiasi program fasilitasi pembiayaan kampung budidaya bandeng di Pangkep dan budidaya ikan air tawar di Sukabumi sebagai *pilot project* bersama Bank Mandiri dan bekerjasama dengan calon *offtaker* PT Japfa Comfeed, namun belum berlanjut karena ketidaksesuaian kualitas produk yang dihasilkan dengan ketentuan *offtaker*.

- Ditjen Pengelolaan Kelautan menyampaikan rendahnya realisasi KUR sektor usaha pergarman karena lahan produksi tambak garam rakyat masih skala kecil sehingga produksinya masih rendah dan tergantung dengan musim. Kondisi tersebut membuat usaha pergarman menjadi salah satu usaha yang belum *bankable*. Saat ini banyak petambak garam yang mengakses kredit melalui koperasi simpan pinjam yang bertindak sebagai avalis.
 - BPSDMKP Puslatluh siap mendukung untuk sosialisasi, edukasi literasi keuangan dan fasilitasi pembiayaan kepada pelaku usaha yang menjadi binaan penyuluh perikanan. Terkait fasilitasi pembiayaan Pusluh bersama SFP telah membentuk koperasi perikanan di Panembang dan telah mendapatkan pembiayaan melalui Bank BNI.
 - Puslatluh memberikan kesempatan bagi Ditjen PDSPKP maupun lembaga keuangan untuk melakukan sosialisasi terkait pembiayaan dan literasi keuangan pada pertemuan rutin dengan penyuluh perikanan.
8. Update progres kegiatan fasilitasi pembiayaan yang telah dilaksanakan pada triwulan II

Lembaga Keuangan	Kegiatan	Lokasi	Progres Fasilitasi Pembiayaan
BRI	Fasilitasi pembiayaan 11 UMKM KP di Desa Nglebeng	Kecamatan Panggul, Trenggalek	Potensi pembiayaan Rp2,25 Milyar (status on check) dan identifikasi potensi pembiayaan di luar 11 UMKM tersebut
Bank Mandiri	Fasilitasi pembiayaan 34 UMKM KP di kawasan TPI Kalibaru	Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Potensi pembiayaan Rp1,55 Milyar (status on check), 1 UMKM terealisasi senilai Rp.50 Juta. Awal

Lembaga Keuangan	Kegiatan	Lokasi	Progres Fasilitasi Pembiayaan
			bulan depan ada percepatan proses
BNI	Fasilitasi pembiayaan ekosistem bisnis Koperasi Bandeng Sejahtera	Kabupaten Pangkep	Belum ada progress (masih menunggu data debitur potensial)
<i>Offered</i>	Pendampingan Akses Pembiayaan bagi 13 Pengelola Gudang Beku Bantuan Pemerintah	Data profil usaha dapat diakses melalui tautan bit.ly/46oFrWR	akan dilaksanakan <i>business matching</i> dengan lembaga keuangan pada bulan agustus

9. Poin penting hasil diskusi :

- Dalam rangka peningkatan realisasi KUR sektor KP diperlukan dukungan kebijakan di level Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan skema KUR khusus dalam bentuk klaster usaha serta relaksasi penyaluran KUR sektor Kelautan dan Perikanan khususnya terkait plafon dan tenor kredit, serta graduasi suku bunga, kepada Pimpinan Kementerian Koordinator Perekonomian.
- Pembiayaan kepada 19 KDMP percontohan belum dapat dilaksanakan meskipun PMK 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan KDMP sudah tertib, karena masih menunggu penetapan Petunjuk Teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi terkait mekanisme penyaluran pendanaan KDMP.
- Potensi pembentukan ekosistem pembiayaan komoditas garam, karena usaha garam pada umumnya tersentralisasi dengan hamparan luas di satu wilayah di sepanjang pesisir pantai dan telah dibentuk koperasi garam yang

difasilitasi oleh Ditjen Pengelolaan Kelautan sebagai avalis dari nelayan garam.



Gambar 3. 20 Rapat Koordinasi Pokja Kredit Program

4) Fasilitasi Akses Pembiayaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel Pada Tanggal 26 September 2025

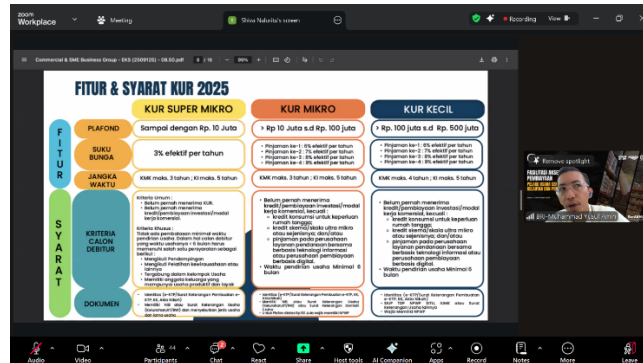
Dalam rangka akselerasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan serta mendukung keberlanjutan pemanfaatan bantuan Pemerintah berupa Gudang Beku, Direktorat Pemberdayaan Usaha bersinergi dengan Direktorat Logistik telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan kepada penerima Bantuan Pemerintah Gudang Beku pada tanggal 25 September 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan program pembiayaan yang dapat diakses dan sesuai dengan kebutuhan usaha perikanan berbasis gudang beku, memberikan ruang diskusi langsung antara penerima bantuan, Bank, dan Pemerintah, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan pemerintah GBP agar berdampak pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha.
2. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Literasi Keuangan dan Pembiayaan, hadir sebagai narasumber adalah Tim Kerja Penyimpanan Direktorat Logistik dan *Commercial & SME Business Group* PT. BRI dan hadir sebagai peserta adalah perwakilan eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, 11 pelaku usaha penerima bantuan GBP dan Dinas KP pembinanya.

3. Pengelola GBP yang hadir sebagai peserta berasal dari Kab/Kota Bandar Lampung, Pandeglang, Lebak, Karawang, Garut, Subang, Pasuruan, Kendari, Banggai Laut, Tual dan Halmahera Selatan yang memenuhi kriteria diantaranya memiliki komitmen baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan gudang beku yang diterima, telah memiliki SKP, dan telah menerapkan SIP CS (aplikasi digital untuk monitoring aktivitas cold storage).
4. Tim Kerja Penyimpanan Direktorat Logistik melaporkan bahwa hingga tahun 2024, telah disalurkan 92 unit gudang beku dan 78 unit ABF dan program Bantuan Pemerintah GBP tetap menjadi bagian dari program prioritas nasional RPJMN 2025–2029, sehingga arah kebijakan akan mendukung optimalisasi sarpras, penerapan SIP CS, pendampingan sertifikasi kelayakan, kemitraan distribusi, serta fasilitasi akses pembiayaan.
5. BRI melalui Divisi Commercial & SME menawarkan beberapa solusi pembiayaan yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui mekanisme individu maupun kelompok dengan melibatkan offtaker, Pinjaman Komersial untuk kredit modal kerja dan kredit investasi, Skema Resi Gudang (RG), dan program pinjaman dana talangan terhadap proses bisnis dengan perputaran transaksi keuangan yang cepat namun harus dibuktikan dengan adanya kerjasama yang mengikat antara penyedia barang dan buyer.
6. Dalam diskusi, teridentifikasi beberapa issue sebagai berikut :
 - a. Total nilai pembiayaan yang dibutuhkan 11 penerima bantuan GBP adalah Rp.13,37 Miliar dengan rencana peruntukan untuk pembelian bahan baku dan penambahan dan perluasan kapasitas produksi.
 - b. Proses bisnis yang dijalankan oleh penerima bantuan GBP adalah sebagai distributor/pemasar ikan dan sebagai penyedia jasa sewa pergudangan, dengan rata-rata omset yang diterima perbulan mencapai Rp500-600 juta per bulan.
 - c. Diantara pelaku usaha penerima bantuan GBP tersebut terdapat beberapa pelaku usaha yang telah bekerjasama dengan dapur SPPG sebagai penyedia menu ikan dalam program MBG dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp100 - 250 juta per minggu.

- d. Kendala yang dialami oleh hampir semua penerima bantuan GBP saat mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan yaitu kondisi dimana salah satu pengurus tercatat dalam BI Checking (SLIK) sehingga pihak lembaga keuangan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan dan issue berikutnya adalah jaminan tambahan yang wajib disertakan tanpa mempertimbangkan bahwa usahanya berjalan dengan baik bahkan beberapa pengelola telah bekerjasama dengan dapur SPPG dalam rangka mendukung program MBG.
7. Atas diskusi tersebut beberapa hasil dan komitmen yang telah disepakati yaitu:
- a. Hasil :
- Penerima bantuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai skema pembiayaan BRI (KUR, KMK, KI, refinancing, RG).
 - Data profil dan proses bisnis 11 penerima bantuan GBP telah diteruskan ke BRI untuk tindak lanjut.
 - Tersampaikan aspirasi dan kendala utama: keterbatasan modal kerja, agunan, serta status SLIK.
 - Usulan skema pembiayaan dana talangan dengan jangka waktu singkat dan tanpa agunan bagi pengelola gudang beku yang mendukung program MBG.
- b. Komitmen :
- BRI menyatakan kesiapan menindaklanjuti data profil 11 pengelola GBP dan apabila ditemukan salah satu pengurus terkendaa SLIK, pihak Bank akan meninjau kembali status SLIK tersebut kepada yang bersangkutan maupun ke lembaga keuangan yang mencatatkan kedalam SLIK tersebut.
 - Direktorat logistik akan terus berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha penerima bantuan GBP dan optimalisasi aplikasi SIP CS yang akan diposisikan sebagai instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas usaha di mata lembaga keuangan.
 - Direktorat Pemberdayaan usaha akan berupaya untuk menambah kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan terutama dalam manajemen usaha, produk pembiayaan dan upaya pencegahan dan mengatasi jika masuk kedalam catatan SLIK.

- Perlunya sinergi KKP dengan BRI, serta komitmen pelaku usaha untuk dapat mengembangkan ekosistem pembiayaan dalam rangka memperluas pasar domestik maupun ekspor, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.



Gambar 3. 21 Fasilitas Akses Pembiayaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp45.315.793,- atau setara dengan 42,17% dari total pagu sebesar Rp107.448.000,-. Penggunaan anggaran pada triwulan II ini sangat efektif dimana capaian kegiatan mencapai 44,55% dengan penggunaan anggaran sebesar 42,17%.

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

IK6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

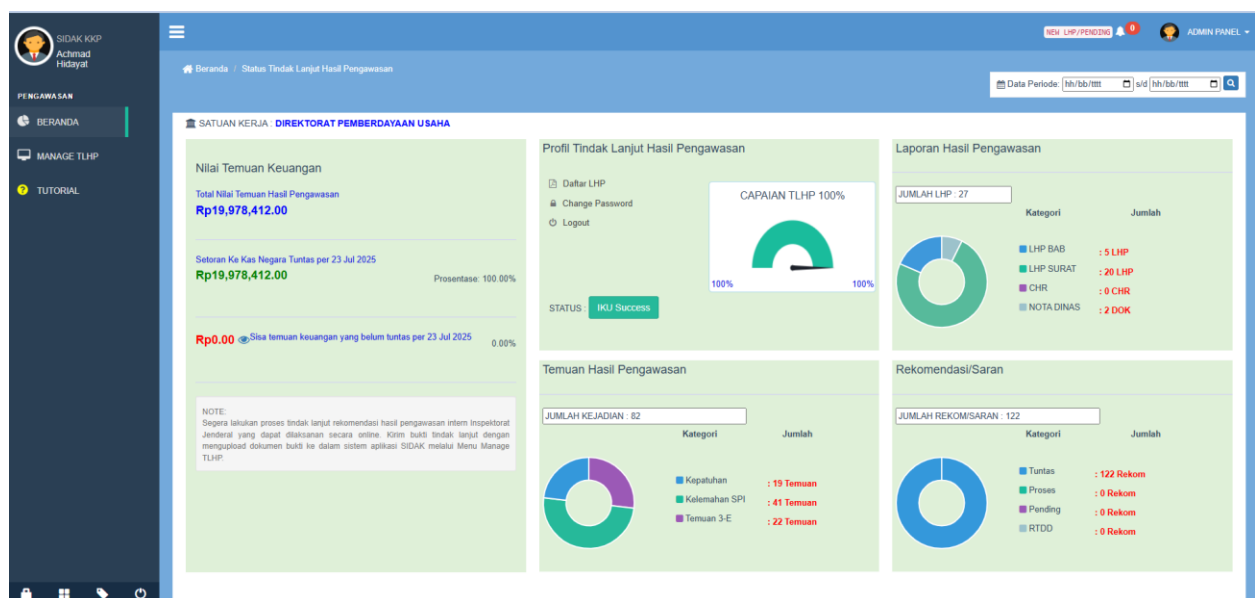
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit dan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK pada Triwulan II 2025, Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target triwulan II. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh

Inspektorat Jenderal tahun 2024 yang telah diselesaikan secara Tuntas dan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	95	80	80	95	100	100	100	100	105,26	125	125	105,26



Gambar 3. 22 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 30 Juni 2025

IK7. Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025

IK8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhad target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	-	75	-	75	-	82,33	-	-	-	109,77	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 ditargetkan 86. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

IK10. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2025
	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	s.d TW II 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW II 2024	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaa n Usaha (Indeks)	87	87	75	87	87,67	92,05	85,11	87,67	100,77	100,77	116,89	100,77

Pada triwulan II tahun 2025, capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah 81,39. Capaian ini setara dengan 107,09% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 76. Jika dibandingkan dengan target tahun

2024 yaitu 87, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 93,55%. Capaian ini setara dengan 107,09% terhadap target triwulan II tahun 2023 yakni 76.

IK11. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025 Tahun 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	-	1	-	1	-	2	-	-	-	200	-	-

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional 2025-2029 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Direktorat Pemberdayaan Usaha selama periode triwulan III tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program seperti upaya pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, fasilitasi akses pembiayaan, pemetaan dan promosi investasi, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan dimana merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap sumber daya produksi serta mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Meskipun berbagai pencapaian positif telah diraih, kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, maupun dinamika ekonomi global yang memengaruhi sektor kelautan dan perikanan nasional. Oleh karena itu, hasil evaluasi dari laporan ini akan menjadi landasan penting dalam perbaikan kebijakan dan strategi ke depan, guna memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.

4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Koordinasi DPMPTSP terkait perizinan berusaha;
2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan II 2025, sebagai berikut:

No	Rekomendasi Triwulan II 2025	Tindak Lanjut Pada Triwulan III 2025
1	Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait perizinan berusaha;	1. telah dilakukan fasilitasi perizinan melalui online maupun offline melalui OSS 2. telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pasca terbit sertifikat standar kepada beberapa pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta pada tanggal 17 dan 18 September 2025
2	Pelaksanaan kegiatan fasiltasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan	Telah dilaksanakan kegiatan : 1. Pendampingan minat investasi PT. Indochina Maritime International pada tanggal 2 Juli 2025 di Jakarta. 2. Pendampingan minat investasi Investor Korea

		Selatan dan Mexico pada tanggal 30 Juli 2025 di Jakarta. 3. Pendampingan minat investasi PT. Hatindo Makmur pada tanggal 14 Juli 2025 di Jakarta. 4. Pendampingan minat investasi PT. Agrowestindo Abadi pada tanggal 11 September 2025 di Jakarta. 5. Webinar Persyaratan, Preferensi Konsumen dan Kiat Menembus Pasar Malaysia dalam Rangka UMKM Naik Kelas tanggal 11 September 2025 6. Webinar KKP x Asspendo tanggal 16 dan 30 September 2025 7. Kegiatan Fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi/kelompok penerima bantuan gudang beku portabel
3	Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.	telah dilaksanakan rapat koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan triwulan II pada tanggal 29 Juli 2025.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAR www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Tornanda Syaifullah**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan


Tornanda Syaifullah

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha


Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan	1. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	13,11
	2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan (Sertifikat)	50
2. Meningkatnya Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen)	5
	4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)	6
	5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp. Triliun)	7,99
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
	7. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
	8. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
	9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
	10. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81
	11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000.000
Total Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	12.619.000.000

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan


Tornanda Syaifullah

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha


Catur Sarwanto

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN NOTA DINAS NOMOR 724/DJPDSPKP.3/TU.140/X/2025 Yth. : Pjt. Direktur Jenderal PDSPKP Dari : Pjh. Direktur Pemberdayaan Usaha Lampiran : Satu berkas Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II, Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan III Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Usaha serta Laporan Kinerja (terlampir) yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun). Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan merupakan nilai total realisasi penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan (usaha penangkapan ikan, usaha perikanan budidaya, usaha pengolahan ikan, usaha garam, usaha pemasaran/perdagangan, jasa perikanan) baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2025. Realisasi Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 7,44 Triliun yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 2,10 Triliun, PMDN sebesar Rp. 4,42 Triliun dan kredit investasi sebesar Rp. 0,91 Triliun. Capaian tersebut setara dengan 101,5% dari target Triwulan III sebesar Rp. 7,33 Triliun atau setara dengan 56,75% dari target tahun 2025 sebesar Rp13,11 Triliun. 2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan (Sertifikat). Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan merupakan jumlah dokumen perizinan berusaha sub sektor Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara	2 pengolahan dan pemasaran baik itu permohonan baru, perpanjangan, maupun perluasan yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha. Jumlah realisasi Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang telah diterbitkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 40 sertifikat yang terdiri dari 14 (empat belas) Sertifikat Standar untuk usaha pengolahan ikan dan 26 (dua puluh enam) Sertifikat Standar untuk usaha pemasaran ikan. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan Triwulan III sebanyak 40 sertifikat maka realisasi jumlah perizinan berusaha tercapai sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebanyak 50 maka realisasi pada triwulan III mencapai 80%. 3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen). Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Jumlah Presentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas sampai dengan Triwulan III sebesar 1,80% dengan kata lain terdapat 12 UMKM yang meningkat omsetnya dari 647 UMKM yang terkursi. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 5% maka realisasi presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas mencapai 36%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator kinerja tersebut antara lain : • Webinar Pemberdayaan Usaha Series dengan tema "Persyaratan, Preferensi Konsumen dan Kiat Menembus Pasar Malaysia Dalam Rangka UMKM Naik Kelas" pada tanggal 11 September 2025 dengan Narasumber Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur dan Ketua Indo_KL Women Perwakilan Diaspora Malaysia.Dihadiri 519 UMKM perikanan dan kelautan dan Pemerintah Daerah; • Webinar Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas dan Profitabilitas Wirausaha Perikanan Berkelanjutan Series 1 (<i>Digital Marketing Micro Business</i>) pada tanggal 16 September 2025, dihadiri 384 UMKM dan Pemerintah Daerah. Webinar diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara
3 Usaha bersama Asppendo; dan • Webinar Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Profitabilitas Wirausaha Perikanan Berkelanjutan Series 2 (<i>Company Profil</i>) pada tanggal 30 September 2025. Dihadiri 528 UMKM dan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama Asppendo. 4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen). Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan tingkat perbandingan kemampuan lembaga usaha sektor KP antara sebelum dan setelah dilakukan penguatan lembaga mengacu pada 3 parameter yaitu operasionalisasi kelembagaan, kinerja kelembagaan dan dampak terhadap anggota koperasi dan masyarakat. Target peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan sebesar 6% dan akan dilaporkan di akhir tahun, sehingga pada triwulan III Nilai Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan belum dapat dihitung capaian realisasinya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator kinerja tersebut telah dilakukan pendataan awal terhadap lembaga usaha yang telah dibina tahun sebelumnya, melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan lembaga usaha, fasilitasi inisiasi pembentukan lembaga usaha, dan fasilitasi perluasan pasar untuk pengembangan lembaga usaha. 5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Kredit Program (Rp. Triliun). Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program merupakan Jumlah nilai realisasi pembiayaan usaha KP yang bersumber dari penyaluran kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMI) kepada pelaku usaha KP yang disalurkan oleh lembaga keuangan Bank maupun Non Bank. Realisasi Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada Triwulan III sebesar Rp. 5,62 Triliun kepada 256.098 Debitur yang terdiri atas Rp. 4,70 Triliun kepada 91.304 Debitur bersumber dari KUR usaha KP dan Rp. 0,92 Triliun kepada 164.794 Debitur bersumber dari Kredit UMI. Capaian nilai pembiayaan sebesar Rp. 5,62 Triliun jika dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar Rp. 5,50 Triliun maka tercapai sebesar 102,18% atau setara dengan 70,44% dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 7,99 Triliun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara	4 Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 maka capaian nilai pembiayaan pada Triwulan III tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8,16% namun secara jumlah penerima kredit program meningkat sebesar 13,44%. 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ljen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran. Nilai realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target triwulan III. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 yang telah diselesaikan secara Tuntas. 7. Realisasi Pengelolaan Anggaran. Dalam mendukung capaian Indikator Kinerja tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 12.619.000.000,- dengan anggaran terblokir dan efisiensi sebesar Rp. 10.796.253.000,- sehingga anggaran efektif yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar Rp. 1.822.747.000,-. Jumlah realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada periode Triwulan III sebesar Rp. 1.058.289.250,- atau setara dengan 58,06% dari Pagu Efektif sebesar Rp. 1.822.747.000,-. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Pjt. Direktur Jenderal lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.  Tri Indah Yooisanti Tembusan 1. Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP 2. Direktur Pemberdayaan Usaha Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3

Evaluasi Rencana Aksi Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III 2025

RENCANA AKSI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA																										
TAHUN ANGGARAN 2025																										
SASARAN/INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)	REALISASI ANGGARAN	TARGET PERSENTASE	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BULAN												REKORD OUTPUT BULAN								
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept
Meningkatnya investasi kegiatan dan pendapatan	Promosi usaha dan investasi KP	385,146	35,111	9	Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Nilai Investasi Katalisis dan Pemasaran	Pemasangan Fasilitas Katalisis dan Pemasaran	122,280	9	100%	Instansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	91,482	14,482	16	Instansi	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	1	2	4	6	8	10	12	14	16
3. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	1,261,381	40,482	32	Instansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	1,011,104	17,381	17	Instansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Jumlah investasi teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran yang diberikan	Pemasaran teknologi dan sistem Pemasaran dan Pemasaran	122,280	4,482	37	Instansi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9